

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN NATUNA PERIODE 2004-2009

*Diajukan Untuk Melengkapi Serta Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjan Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial*



Oleh

ZULDI

10675005178

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Pengambilan Judul Skripsi ini berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di DPRD Kabupaten Natuna yakni ketidak mampuan DPRD Kabupaten Natuna dalam menjalankan kewenangan yang diembankan kepadanya, sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Natuna seperti tidak teraplikasinya keinginan masyarakat Natuna dan program-program yang telah direncanakan pemerintah Kabupaten Natuna.

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif, yang dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Natuna. Dari jumlah populasi maka penulis mengambil sampel sebanyak 100 orang. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi dan penyebaran angket kepada responden.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Natuna periode 2004-2009 kurang baik, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Secara umum DPRD Kabupaten Natuna mempunyai 3 (tiga) fungsi dasar yaitu: fungsi pembuatan kebijakan (legislasi), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dari tiga fungsi DPRD Kabupaten Natuna yang dapat mereka jalankan adalah fungsi legislasi, dikarenakan masyarakat merasa puas terhadap perda yang telah dibentuk, dalam masa jabatannya DPRD telah membuat 82 buah perda yang ada di Kabupaten Natuna dan diantara perda yang ada tersebut berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Natuna. Sedangkan fungsi anggaran dan pengawasan dikategorikan belum mampu dijalankan karena, anggaran setiap tahunnya tidak sesuai dengan pembangunan yang ada, baik dari segi fisik maupun mental, terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh anggota DPRD, adanya perda, peraturan bupati dan kebijakan bupati yang tidak berjalan dengan baik, kerja Internasional belum mampu diwujudkan. Ketidak mampuan dalam menjalankan kinerja tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya rasa tanggungjawab, kurang melihat kondisi dan keadaan masyarakat, Kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat, kurangnya pengawasan masyarakat terhadap kinerja DPRD dan kurangnya media masa yang berpihak kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	19
1.3. Tujuan Penelitian	21
1.4. Manfaat Peneliti.....	21
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1. Otonomi Daerah.....	22
2.2. DPRD	24
2.3. Pengertian Kinerja.....	27
2.4. Good Governence	29
2.5. Demokrasi.....	31
2.5. Al-Qur'an dan AL-Hadis	34
2.6. Hipotesis.	35
2.8. Konsep Orasional.....	35
2.9. Variabel Penelitian.....	37
2.10. Teknik pengukuran	38
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.3. Populasi Dan Sampel	42
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	44
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	44
BAB IV DESKRIPSI UMUM KABUPATEN NATUNA DAN PROFIL DPRD KABUPATEN NATUNA	
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Natuna.....	47
4.1.1. Deskripsi Wilayah.....	47

4.1.2. Demografi.....	48
4.1.3. Sosial Budaya dan Pendidikan.....	49
4.1.4. Pemerintahan.....	52
4.2. Profil DPRD Kabupaten Natuna	56
4.2.1. Kedudukan DPRD.....	57
4.2.2. Tugas dan Wewenang DPRD.....	57
4.2.3. Hak dan Kewajiban DPRD.....	58
4.2.3.1. Hak DPRD.....	58
4.2.3.2. Kewajiban DPRD.....	59
4.2.4. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Natuna.....	60
4.2.4.1. Pimpinan.....	60
4.2.4.2. Panitia Musyawarah.....	61
4.2.4.3. Komisi.....	62
4.2.4.4. Badan Kehormatan.....	65
4.2.4.5. Panitia Anggaran.....	66
4.2.4.6. Panitia Legislasi.....	68
4.2.4.7. Alat Kelengkapan Lain-Lain Yang Dibutuhkan.....	69
4.2.4.8. Kedudukan, Susunan dan Tugas Fraksi-Fraksi.....	70
4.3. Identitas Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009.....	71
4.3.1. Anggota DPRD Kabupaten Natuna Berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikan.....	71
4.3.2. Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009 Berdasarkan Tingkat Usia.....	71
4.3.3. Anggota DPRD Kabupaten Natuna Berdasarkan Jenis Kelamin.....	72
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Identitas Responden.....	73
5.1.1. Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	73
5.1.2. Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	74
5.1.3. Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	75

5.2. Kedudukan, Susunan, Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban DPRD Kabupaten Natuna.....	76
5.2.1. Kedudukan DPRD.....	76
5.2.2. Tugas dan Wewenang DPRD.....	77
5.2.3. Hak.....	77
5.2.4. Kewajiban.....	78
5.3. Fungsi DPRD Kabupaten Natuna.....	79
5.3.1. Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Natuna.....	81
5.3.2. Fungsi Anggaran DPRD Kabupaten Natuna.....	87
5.3.3. Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Natuna.....	99
5.4. Faktor Penghambat Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2004-2009 Kabupaten Natuna Kurang Baik.....	112
BAB IV PENUTUP	
6.1. Kesimpulan.....	117
6.2. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah menjadi isu sentral jika kita amati khususnya di Indonesia. Menghadapi permasalahan Otonomi Daerah yang multi dimensi ini, maka sejak tahun 2002 telah beredar kampanye untuk merevisi UU Nomor 22 Tahun 1999, yang akhirnya baru terealisasi pada akhir periode masa jabatan DPR 1999-2004. Proses pembahasan yang memakan waktu berlarut-larut, tidak hanya itu, yang paling urgensi adalah implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Selama 64 tahun sejak 1945 sampai 2009, kedudukan DPRD dalam Susunan Pemerintahan Daerah berlangsung naik turun dan mengalami pasang surut sesuai dengan perubahan politik pada waktu itu. Pergolakan itu diakhiri dengan hadirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan hasil revisi terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999.

Sesuai dengan isi konsideran UU Nomor 32 Tahun 2004 disebut: “bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah sehingga perlu diganti.”

Dalam setiap perubahan Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah, yang otomatis ikut mengatur tentang susunan dan kedudukan DPRD baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, titik sentralnya adalah tentang peran dan ruang lingkup fungsi, kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD. Pergeseran dan perubahan ini merupakan gambaran

proses perkembangan dan pertumbuhan sistem ketatanegaraan di Indonesia sejak 1945 hingga sekarang.

Dalam suasana reformasi maka Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, juga mengalami beberapa kali amandemen dan khususnya menyangkut Pasal 18 Tentang Pemerintah Daerah mengalami perubahan dan penambahan isi yang cukup signifikan.

Sesuai dengan kondisi politik pada saat itu, maka rumusan tentang kedudukan DPRD dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mengalami perubahan mendasar dan hampir mirip seperti kembali kepada keadaan dan suasana UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu terlihat dalam rumusan tentang pemerintahan daerah. Dalam rumusan pasal 3 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan:

Pemerintah daerah adalah:

- a. Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi.
- b. Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Lebih jauh dalam Pasal 40 UU Nomor 32 Tahun 2004 dirumuskan: “DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.”

Rumusan diatas mirip dengan isi Pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 1974 yang berbunyi: “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif daerah. Pasal 16 ayat (2) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah.”

Berbeda dengan UU Nomor 4 Tahun 1999, maka UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD memisahkan susunan dan kedudukan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

Selanjutnya yang dimaksud dengan DPRD Kabupaten adalah lembaga yang mewakili rakyat untuk daerah Kabupaten yang bersangkutan. Anggota DPRD Kabupaten dipilih dari partai politik dalam pemilu. Fungsi utama DPRD Kabupaten adalah legislasi dan pengawasan, yaitu membuat Peraturan Daerah dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten. Di samping fungsi legislasi dan pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten, terdapat fungsi anggaran yaitu kewenangan untuk menetapkan APBD.

Di samping pengaturan mengenai fungsi DPRD, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, UU Nomor 22 Tahun 2003 juga mengatur menyangkut susunan kedudukan dan keanggotaan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD.

Dalam susunan dan keanggotaan DPRD Provinsi seperti diatur dalam Pasal 68 UU Nomor 22 Tahun 2003 disebutkan: “DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.” Adapun anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah sekurang-kurangnya dua puluh orang dan sebanyak-banyaknya empat puluh lima orang. Keanggotaan DPRD Kabupaten diresmikan dengan keputusan Gubernur atas nama Presiden.

DPRD Kabupaten adalah salah satu unsur pemerintah daerah Kabupaten. Kedudukan DPRD Kabupaten adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Kedudukan DPRD Kabupaten dengan Bupati sebagai kepala pemerintahan di tingkat Kabupaten adalah sejajar. Artinya DPRD Kabupaten bukan bagian dari Bupati, bukan bawahan dan juga bukan atasan. Keduanya adalah mitra sejajar

yang bersama-sama menciptakan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan transparan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang memuaskan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 42 menyatakan Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bupati/Walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
- f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Selanjutnya anggota DPRD Kabupaten memiliki hak yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (1), hak tersebut adalah mengajukan Rancangan Perda, mengajukan pertanyaan kepada Bupati, menyampaikan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler dan administratif. Dalam hal menggunakan hak mengajukan pertanyaan, caranya anggota yang bersangkutan menyusun pertanyaan secara tertulis, singkat dan jelas.

Pertanyaan tersebut lalu disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD kemudian mengadakan rapat untuk menilai apakah pertanyaan yang diusulkan itu layak atau tidak untuk disampaikan kepada Bupati. Jika dinilai layak, maka Pimpinan DPRD membentuk panitia musyawarah. Setelah mendapat persetujuan dalam Panitia Musyawarah, Pimpinan DPRD meneruskan kepada Bupati.

Selain hak mengajukan pertanyaan kepada Bupati, di ayat (2) anggota DPRD juga memiliki hak protokoler, keuangan dan administratif yang pelaksanaannya diatur oleh DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain kedudukan, fungsi, tugas, hak dan wewenang, tentunya DPRD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kewajiban yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 45 diantaranya:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggungjawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;
- h. Menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Berbeda dengan semangat reformasi Tahun 1998, ternyata jalannya demokrasi setelah pemilu 1999 berjalan agak kurang mulus, terutama dalam berbagai skandal dan tuduhan “politik uang” di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Disahkannya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang teramat besar bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut asas Desentralisasi dan tugas dan pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka tidak salah jika masyarakat menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap tugas dan kinerja DPRD, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang juga telah menjadi kewajiban anggota DPRD untuk memberikan laporan pertanggungjawaban, baik secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pilihannya.

Apabila kinerja yang dilakukan oleh anggota DPRD, sesuai dengan acuan yang telah ditentukan maka hasil yang akan di dapat sesuai dengan keinginan dan tujuan yang telah ditentukan, selaku wakil masyarakat di pemerintahan yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta mengaplikasikan ke dalam kehidupan yang nyata sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, maka anggota DPRD harus menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan teliti serta mampu melihat dan membaca keadaan yang terjadi dan mencari solusinya untuk kesejahteraan masyarakat.

Di dalam bukunya (Anwar Prabu Mangkunegara, 2005: 76) ia mendefinisikan kinerja (prestasi kerja) adalah; hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Jika kita mengacu pada pengertian tersebut, maka kinerja yang baik akan mendapatkan hasil yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang tinggi dalam menjalankan tugas yang telah diberikan kepada pihak yang dipercayakan dalam urusan tertentu, hal ini akan terwujud di dalam menjalankannya jika anggota DPRD mempunyai kemampuan (*skill*) yang mantap dalam menjalankan sistem pemerintahan pada saat sekarang. Skill atau kemampuan akan tercipta dengan media pendidikan, baik formal atau pun non formal, dan yang lebih baik lagi kedua media pendidikan dijalankan dengan beriringan dan senantiasa berkesinambungan, karena dengan kemampuan yang mantap akan mampu menghadapi permasalahan yang ada dan mampu membuat kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu tidak kalah pentingnya, adanya motivasi atau keinginan yang tinggi dari anggota DPRD untuk membangun daerahnya sendiri. Karena dengan adanya motivasi ini, maka mereka akan lebih mendahulukan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi mereka. Rasa ini akan terwujud apabila selalu diberikan pelatihan dan penyampaian yang menjelaskan betapa penting dan besarnya manfaat untuk membangun daerah sendiri, baik itu pelatihan motivasi yang bersipat agamis maupun keuntungan duniawi, hal di atas sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli yaitu Keith Davis (1964:484) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja yaitu:

1. Faktor Kemampuan yaitu kemampuan (*abiliti*) terdiri dari potensi (*IQ*) dan kemampuan relati (*knowledge dan skill*) artinya, pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (*IQ* 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan mudah mencapai kinerja yang diharapkan

2. Faktor Motivasi, motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).

Secara umum kinerja DPRD Natuna diwujudkan dalam tiga peran pokok yang dimiliki, yaitu:

1. *legislasi*. Mengatur seluruh kepentingan daerah Natuna, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan).
2. *Budgeting*. Perencanaan Anggaran Daerah (APBD) Natuna. Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan *control* efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.
3. Pengawasan. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

Ketiga peran yang dimiliki oleh Anggota DPRD Natuna juga diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

1. *Representation*. Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan masyarakat Natuna ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD Natuna senantiasa berbicara “atas nama rakyat Natuna”;
2. *Advokasi*. Agregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar

mengingat aspirasi masyarakat Natuna mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar-menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.

3. *Administrative oversight*. Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif Natuna yang dianggap menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum. Dan bukan sebaliknya menjadi penyokong dalam segala tindakan penyelewangan terhadap anggaran daerah.

Jadi untuk melakukan perubahan daerahnya baik bersifat fisik maupun mental diperlukan orang-orang yang mempunyai potensi untuk memikirkan dan membangun daerah pilihannya. Lalu yang dimaksud dengan daerah pemilihan adalah batas wilayah dan atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Lingkup daerah pemilihan dapat ditentukan berdasarkan:

- a) Wilayah administrasi pemerintah (Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota),
- b) Jumlah penduduk,
- c) Dan kombinasi faktor wilayah dengan jumlah penduduk.

Besar daerah pemilihan merujuk pada jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan yaitu apakah satu kursi untuk setiap daerah pemilihan (*single-member constituency*) ataukah lebih dari satu kursi untuk setiap daerah pemilihan (bukan *soft bicameral* dan juga bukan pula *strong bicameral*), yaitu keberadaan DPR sebagai lembaga perwakilan yang mewakili penduduk sedangkan DPD mewadahi keterwakilan daerah, maka yang perlu dicermati dalam Undang-Undang Pemilu ialah apakah daerah pemilihan anggota DPR didasarkan sepenuhnya berdasarkan jumlah penduduk ataukah berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan.

Lingkup dan besaran daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten menurut UU No. 27 Tahun 2009 tergambar dalam ketentuan berikut:

- a. Daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten adalah Kecamatan atau Gabungan Kecamatan.
- b. Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- c. Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk anggota DPRD Kabupaten Natuna berjumlah 20 orang dengan pembagian daerah pemilihan terdaftar dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel I.1. Pembagian Wilayah Asal Daerah PemilihanMDPRD Kabupaten Natuna
Periode 2004-2009

No	Wilayah Pemilihan	Ruang Lingkup Wilayah Pemilihan
1.	DAPIL I	1. Kec. Bunguran Timur 2. Kec. Bunguran Timur Laut 3. Kec. Bunguran Tengah 4. Kec. Bunguran Barat 5. Kec. Bunguran Utara 6. Kec. Pulau Tiga 7. Kec. Pulau Laut
2.	DAPIL II	1. Kec. Serasan 2. Kec. Subi 3. Kec. Midai
3.	DAPIL III	1. Kec. Siantan 2. Kec. Siantan Selatan 3. Kec. Pal Matak 4. Kec. Siantan Timur 5. Kec. Jemaja 6. Kec. Jemaja Timur

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna 2009

Pemerintahan yang baik merupakan harapan semua pihak. Pemerintahan yang baik tidak saja menyangkut struktur atau tata penyelenggaraan pemerintahan yang ada, melainkan segala substansi yang melekat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan serta respons masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Didalam kalangan luas masyarakat terdapat semacam anggapan bahwa DPRD bekerja tidak efektif. Hal ini ditandai dengan kurangnya kontak masyarakat dengan DPRD atau mereka selalu membawakan atau mengadukan permasalahan langsung ke DPR dengan melangkahi DPRD di daerah yang bersangkutan. Sikap *skeptis* masyarakat terhadap kinerja DPRD dan terhadap anggota DPRD semakin nyata lagi, lewat kesan pemberitaan, bahwa sidang-sidang DPRD yang sering kosong. Begitu juga bila kita mengkaji lebih spesifik terhadap keberadaan DPRD Provinsi Kabupaten Natuna, tidak ubahnya seperti DPRD di beberapa tempat lainnya di Indonesia.

Proses rekrutment anggota-anggota DPRD Kabupaten Natuna, telah memunculkan keluhan dan kekhawatiran menyangkut kualifikasi kemampuan teknis anggota DPRD itu sendiri. Penyebab dari kesemuanya itu adalah pada persoalan identifikasi latar belakang profesi, tingkat pendidikan dan kepentingan yang berbeda bagi anggota DPRD tersebut. Hal ini disebabkan karena DPRD merupakan representasi dari rakyat yang merupakan orang-orang titipan dari partai politik yang berbeda-beda yang juga memiliki maksud dan tujuan kepentingan yang berbeda pula.

Sebagai sebuah lembaga politik yang memiliki peran dan fungsi sangat besar, sudah selayaknya mampu mengakomodasi aspirasi dari masyarakat dan memfasilitasinya. Untuk itu yang diperlukan dan dipersyaratkan bagi anggota DPRD sesungguhnya adalah komitmen manajerial dan sensitifitas dalam menyerap aspirasi, mengartikulasi kepentingan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat pada umumnya yang mana sebagai wujud konkrit dari fungsi yang dimiliki oleh DPRD itu sendiri.

Anggota DPRD Kabupaten Natuna dinilai tidak begitu efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat di daerah Kabupaten. Banyak keluhan dari masyarakat dan

kalangan organisasi masyarakat tentang kinerjanya baik itu dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Hasil dari kinerja yang dilakukan oleh anggota DPRD Natuna tidak begitu memuaskan sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat Natuna baik dari segi pembangunan yang bersifat fisik maupun mental.

Ada beberapa permasalahan yang dianggap urgen atau penting oleh kalangan organisasi masyarakat dan masyarakat Natuna, tetapi permasalahannya tersebut tidak begitu diperhatikan oleh anggota DPRD Kabupaten Natuna, sehingga masyarakat menilai kinerja DPRD Kabupaten Natuna tidak begitu efektif.

Natuna dikenal dengan daerah yang kaya hasil alamnya terutama dibidang migas dan merupakan Kabupaten yang terbesar APBD setiap tahunnya jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, tetapi pembangunan yang ada tidak begitu memuaskan bagi Kabupaten Natuna.

Selain itu Natuna juga mempunyai daerah laut yang begitu luas dan yang didalamnya mempunyai sumber penghasilan yang begitu besar jika diolah dengan profesional dan maksimal mungkin akan bisa membuat rakyat Natuna menjadi makmur. Dalam penanganan hasil laut Natuna, anggota DPRD Kabupaten Natuna tidak begitu ambil pusing dengan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga hasil laut Natuna tidak bisa dikelola dengan semaksimal mungkin masyarakat Natuna.

Di laut Natuna hasilnya banyak dikelola oleh pihak-pihak yang berasal dari luar Natuna seperti kapal penangkap ikan dari Tanjung Balai Karimun, Kalimantan dan kapal-kapal yang berasal dari Negara tetangga seperti Thailand, Taiwan, Vietnam dalam baik resmi atau ilegal.

Masyarakat Natuna pada umumnya berpendidikan rendah sehingga banyak diantara mereka yang bekerja sebagai nelayan tradisional, melihat keadaan yang berada dilaut Natuna

begitu rusaknya yang dimana, kapal-kapal asing begitu banyak masuk di daerah Natuna dengan menggunakan teknologi yang canggih, sehingga masyarakat asli merasa tersisihkan dengan adanya persaingan yang begitu ketat tersebut. Sehingga hasil laut Natuna pun menjadi asing dan susah didapatkan bagi masyarakat Natuna sendiri. Melihat permasalahan yang ada sekarang ini masih tidak begitu dihiraukan oleh anggota DPRD, yang dimana mereka ada dengan tujuan agar semua aspirasi bisa disampaikan dan diaplikasikan dalam kehidup dan pembangunan nyata.

Selain itu ada beberapa hal yang dianggap prioritas dari segi pembangunan fisik juga tidak begitu diperhatikan seperti jalan lintas antar kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam proses mempermudah akses ke Kabupaten.

Jika dilihat dari segi masa reses anggota DPRD yang ada di kabupaten sudah cukup memadai tetapi alhasilnya pun masih tidak begitu nampak perubahan yang terjadi. Masa reses adalah masa dimana tiap-tiap anggota DPRD turun kemasyarakat sesuai dengan daerah pilihannya masing-masing. Dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Natuna Tahun Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Natuna Nomor KPTS.14/DPRD/2007 disebutkan reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja yang mana rentang waktunya dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel I.2. Tahapan dan Rentang Waktu Reses Anggota DPRD.

No	Tahapan	Rentang Waktu
1.	Tahap I	Akhir April-Awal Mei
2.	Tahap II	Akhir Agustus-Awal September
3.	Tahap III	Akhir Desember-Awal Januari

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Natun2009.

Dari tabel 1.2, dapat dilihat bahwa tahap dan rentang waktu reses anggota DPRD Kabupaten Natuna. Waktu reses telah ditentukan yakni 6 (enam) hari kerja untuk kembali kemasyarakat sesuai daerah pilihannya masing-masing.

Pada masa reses itulah tiap-tiap anggota DPRD kembali ke masyarakat sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing untuk menjaring aspirasi dan sekaligus untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugas dan kinerjanya secara moral dan politis. Setiap melaksanakan tugas reses, anggota DPRD baik perseorangan maupun kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna. Selanjutnya untuk kegiatan dan jadwal reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan dari panitia musyawarah.

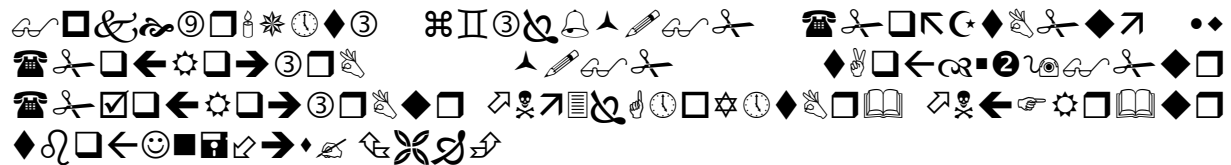
Bila kita mengacu pada prinsip *Good Governance* adanya prinsip yang menganjurkan untuk transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah sikap adanya keterbukaan akses bagi semua pihak yang berkepentingan pada informasi yang dibutuhkan, perundangan dan kebijakan Pemerintah Lokal. Sedangkan akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pembuat kebijakan seperti pemerintah kepada publik atau *stake holders*.

Jika kesempatan untuk mengakses informasi seputar apa yang telah dilakukan pemerintah dan apa yang belum dilakukan oleh pemerintah, alangkah terwujudnya cita-cita untuk menjadikan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dari potret pandangan masyarakat diatas, lepas dari sikap pro dan kontra, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada sesuatu yang belum begitu sesuai antara cita-cita masyarakat dengan praktek lembaga perwakilan di Indonesia, dalam hal ini terutama anggota DPRD yang ada di Kabupaten Natuna periode 2004-2009. Setelah 64 Tahun merdeka, ternyata pola pikir masyarakat semakin kritis dan menuntut lebih banyak dari wakil-wakilnya. Masyarakat menuntut hadirnya anggota-anggota DPRD yang ideal, bukan yang asal-asal kerja dan mengharapkan gaji saja, apabila ini semua tidak terwujud maka tunggulah datangnya keharcuran, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“(Imam al-Bukhari menyatakan) Muhammad bin Sinan menyampaikan (riwayat) kepada kami, Qulaih bin Sulaiman telah menyampaikan (riwayat) kepada kami, Hilal bin Ali telah menyampaikan (riwayat) kepada kami, (riwayat itu) dari Atha’, dari Yasar, dari Abu Hurairah r.a yang berkata: Rasulullah Saw bersabda: Apabila suatu amanah, disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. (Abu Hurairah) bertanya: bagaimana meletakkan amanah itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab: Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.”

Dalam rangka menuju DPRD yang ideal, maka secara nyata terasa adanya kesenjangan (*gap*) antara DPRD dengan masyarakat secara timbal balik. Hal ini disebabkan karena sistem komunikasi yang kurang lancar dan kurang efektif atau karena minimnya mekanisme kontak antara DPRD dengan rakyat. Sistem kerja Hubungan Masyarakat DPRD belum berfungsi dengan baik dan yang paling urgensi adalah tidak adanya kejelasan terhadap mekanisme penyampaian transparansi dan akuntabilitas terhadap tugas dan kinerjanya DPRD kepada masyarakat pemilih di daerah pemilihannya, Allah berfirman dalam QS. Al-Anfaal; 27:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Suatu hal yang sangat wajar ketika adanya tindakan yang sedikit ekstrim dari masyarakat terhadap DPRD Kabupaten Natuan. Suatu sikap yang *skeptis* dan remeh terhadap DPRD yang ditunjukkan oleh masyarakat merupakan cambuk bagi DPRD untuk berbuat lebih baik dan menjadikan diri seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat selama ini. Hal yang positif yang dapat diambil oleh DPRD adalah bagaimana menjalankan tugas, wewenang, peran dan fungsi sebagai DPRD dengan baik tanpa adanya kesalahan dan ketimpangan di mata masyarakat yang selama ini citra DPRD jauh seperti yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya, khususnya DPRD di Kabupaten Natuna Priode 2004-2009.

Sikap *skeptis* masyarakat dan pandangan remeh yang dilontarkan kepada DPRD bukanlah suatu hal yang lahir secara mendadak, melainkan suatu hasil dari proses yang cukup lama dan saling berkesinambungan dari masa sebelum kemerdekaan sampai di era reformasi. Demi memulihkan citra DPRD dimata masyarakat, maka seharusnya DPRD melakukan pembenahan diri secara nyata. Adapun cara yang harus dilakukan oleh DPRD dalam rangka pembenahan diri, mencakup tiga hal pokok yaitu:

- a. Latar belakang anggota DPRD.
- b. Mekanisme kerja DPRD
- c. Komunikasi antara DPRD dengan pemerintah dan DPRD dengan rakyat.

Berdasarkan permasalahan yang tertera diatas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna Periode 2004-2009.”**

I.2. Perumusan Masalah

DPRD Kabupaten adalah salah satu unsur pemerintah daerah Kabupaten. Kedudukan DPRD Kabupaten adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila. Keberadaan DPRD Kabupaten Natuna sangat menentukan arah perubahan yang

dengan kondisi daerah Kabupaten Natuna dan juga keinginan dari masyarakat, maka sangat diharapkan keseriusan dan kesungguhan dari anggota DPRD Kabupaten Natuan dalam memaksimalkan kinerjanya. Kinerja yang dilakukan dengan maksimal akan memperoleh hasil yang maksimal pula, begitu pula sebaliknya.

Sebagian besar daerah Kabupaten Natuna merupakan lautan, sehingga untuk memudahkan proses transaksi maka sangat dibutuhkan pasilitas trnsportasi yang memadai

seperti, pelabuhan, kapal-kapal laut dan transportasi laut lainnya. Di Natuna kondisi pelabuhan yang ada tidak kondusif lagi untuk digunakan, itu dikarenakan kondisi yang sudah rusak dan pula usia pembangunan yang sudah lama. Sedangkan kapal-kapal yang melakukan perjalanannya ke Natuna dua minggu sekali itu pun kalau kondisi kapalnya memungkinkan. Selain itu ada beberapa pembangunan yang dianggap penting bagi pertumbuhan daerah tetapi tidak dijadikan prioritas dalam pembangunan daerah Natuna seperti Bandara, yang mana di Natuna sekarang ini masih menggunakan bandara AURI yang serba kekurangan. Ini menjadi sorotan karena pembangunan akan lancar apabila kondisi transportasi juga lancar.

Dengan adanya kabar yang sangat memperhatikan Kabupaten Natuna yaitu pengolahan anggaran yang tidak maksimal, anggaran yang begitu besar yang didapatkan dari APBD dari setiap tahun dan juga dana bagi hasil migas yang lumayan besar. Tetapi dengan anggaran yang begitu pun tidak membuat Natuna menjadi daerah yang sejahtera. Pembangunan yang ada kurang tepat sasaran, sehingga hasilnya pun kurang memuaskan. Selain itu dana yang begitu besar pun digelapkan oleh anggota DPRD Kabupaten Natuna.

Masyarakat sangat mengharapkan perhatian dan dukungan dari pemerintah, agar mereka bisa menjalani kehidupan yang stabil dan normal. Sentuhan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung seperti dari segi keuangan, pendidikan, perekonomian dan beberapa bidang lainnya sangat menentukan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakat selalu menunggu akan perhatian dari pemerintah yang lebih terhadap mereka, tetapi nyatanya penantian tinggal penantian, janji tinggal janji, aspirasi masyarakat yang selama ini ingin disampaikan hanya tinggal kenangan. Masyarakat sudah bosan untuk ditipu, kini kepercayaan masyarakat Natuna sudah mulai berkurang kepada pemerintah daerah Kabupaten Natuna, terutama kepada DPRD yang selama ini mereka harapkan perjuangannya.

Berdasarkan latar belakang dan gejala yang telah penulis kemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna Periode 2004-2009 ?
2. Mengapa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna Periode 2004-2009 kurang baik ?

I.3. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna Periode 2004-2009.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat mengapa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009 kurang baik.

I.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sumbangan pikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu sosial dan politik.
2. Bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk mempeleajari tentang DPRD Kabupaten Natuna.
3. Untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi penulis.
4. Menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dan menambah khzanah kepustakaan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka akan dikemukakan beberapa konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

II.1. Otonomi Daerah

Gagasan Otonomi Daerah yang melekat pada pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memiliki kaitan yang sangat erat dengan demokratisasi kehidupan politik dan pemerintahan baik ditingkat lokal maupun nasional. Asumsinya, agar demokrasi bisa terwujud maka daerah harus memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Terlepas dari pro-kontra pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota yang menimbulkan ketegangan dan tarik ulur kewenangan dengan pemerintah atasnya, kita harus mengakui bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia yang secara radikal dilaksanakan tahun 2001 telah membuka peluang bagi berdirinya sendi-sendi demokrasi di tingkat lokal.

M. Ryaas Rasyid dkk (2005:173), Visi Otonomi Daerah itu dapat dirumuskan dalam tiga ruang lengkap intraksinya yang utama yaitu Politik, Ekonomi, serta sosial dan budaya.

Berdasarkan visi ini, maka konsep dasar Otonomi Daerah merangkul hal-hal berikut ini:

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik Kepala Daerah.
2. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah.
3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintah yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.

4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan.
5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan Negara dan Daerah.
6. Perwujudan desentralisasi fiskal.
7. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa.

Kewenangan yang luas dalam bentuk “Otonomi Daerah” akan memungkinkan daerah mewujudkan minimal dua visi strategis demokratik.

Pertama, komitmen untuk mewujudkan kebebasan individu yang disertai tanggungjawab dalam pelaksanaannya, artinya adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap tugas dan kinerjanya.

Kedua, gagasan tentang adanya kedaulatan rakyat dan kesetaraan politik. Dalam konsep ini, tanggungjawab pelaksanaan pemerintahan tidak hanya berada ditangan pemerintah yang secara formal ditunjuk untuk tugas itu, tetapi juga berada ditangan rakyat yang berdaulat, bebas dan memiliki hak-hak yang sama. Terutama dalam hal keterlibatan masyarakat dan *stake holder* dalam pembuatan kebijakan. Visi demokratik ini mengasumsikan bahwa kemauan untuk menerima keadaan tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur dan bagaimana keputusan tentang prinsip-prinsip kebijakan diambil.

Keberadaan dan berfungsinya lembaga perwakilan, baik dipusat maupun di daerah, dari suatu negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi konstitusional sering dijadikan oleh para ahli sebagai ukuran dari kadar demokrasi yang dilaksanakan dalam negara tersebut.

II.2. DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya yang disebut dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna selanjutnya disebut sebagai DPRD Natuna adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ditingkat Kabupaten Natuna.

Fungsi utama DPRD Kabupaten adalah legislasi dan pengawasan, yaitu membuat Peraturan Daerah dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten. Disamping fungsi legislasi dan pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten, terdapat fungsi anggaran yaitu kewenangan untuk menetapkan APBD.

Untuk melaksanakan Tugas Dan Wewenangnya, DPRD Kabupaten mempunyai tugas:

1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bupati/Walikota
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
6. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Selanjutnya anggota DPRD Kabupaten memiliki hak mengajukan Perda, mengajukan pertanyaan kepada Bupati, menyampaikan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler dan administratif. Dalam hal menggunakan hak mengajukan pertanyaan, caranya anggota yang bersangkutan menyusun pertanyaan secara tertulis, singkat dan jelas. Pertanyaan tersebut lalu disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD kemudian mengadakan rapat untuk menilai apakah pertanyaan yang diusulkan itu layak atau tidak untuk disampaikan kepada Bupati. Jika dinilai layak, maka Pimpinan DPRD membentuk panitia musyawarah. Setelah mendapat persetujuan dalam Panitia Musyawarah, Pimpinan DPRD meneruskan kepada Bupati.

Selain hak mengajukan pertanyaan kepada Bupati, anggota DPRD juga memiliki hak protokoler, keuangan dan administratif yang pelaksanaannya diatur oleh DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain kedudukan, fungsi, tugas, hak dan wewenang, tentunya DPRD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kewajiban yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 45 diantaranya:

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
5. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
6. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

7. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggungjawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;
8. Menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
9. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Berbeda dengan semangat reformasi tahun 1999, ternyata jalannya demokrasi setelah pemilu 1999 berjalan agak kurang mulus, terutama dalam berbagai skandal dan tuduhan “politik uang” di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan terbitnya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang teramat besar bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut asas Otonomi dan tugas dan pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II.3. Pengertian Kinerja

Anuar Prabu Mangkunegara, (2005: 67), kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performan* (prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Keith Davis, (Dalam Anuar Prabu Mangkunegara, *Menejemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, 2005:67), mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja (prestasi kerja) yaitu:

1. Faktor Kemampuan yaitu kemampuan (*abiliti*) terdiri dari potensi (IQ) dan kemampuan reliti (*knowledge* dan *skill*) artinya pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan mudah mencapai kinerja yang diharapkan.
2. Faktor Motivasi (*kemampuan*), motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).
3. Lingkungan kerja (sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan) **Riki**, (2004:130).

Herbert J. Spiro, (*dalam Afrizal Gerhana Saputra pelaksanaan penyampaian laporan pertanggungjawaban anggota DPRD 2008: 30*) menurutnya, *responsibility* (tanggungjawab) dapat diartikan sebagai *accountability* (perhitungan), sebagai *obligation* (kewajiban) dan sebagai *cause* (penggerak).

Accountability, menunjukkan sejauh mana seorang pelaku pemerintah terbukti mampu menjalankan tugas atau perintah yang diamanatkan kepadanya, menurut cara, alat dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, terlepas dari persoalan apakah ia menyetujui perintah itu itu atau ia merasa terpaksa, dipaksa, harus atau karena tiada pilihan lain dan dalam siap menghadapi segala resiko.

Obligativeness, menunjukkan sejauh mana seorang pelaku pemerintah menempati, menunaikan dan memenuhi janjinya.

Causativeness, menunjukkan sejauh mana tingkat kepedulian yang menggerakkan seseorang pelaku pemerintah terlepas dari status atau jabatannya, untuk bertindak atas inisiatif

sendiri (*Freies Ermessen*) berdasarkan pilihan bebas (*free-will*) dalam menghadapi suatu masalah atau perubahan dan siap menanggung segala resiko dan akibatnya.

Cohan dan Arato, (*dalam James G. March dan Johan P. Olsen, Otonomi Daerah Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika, Yogyakarta: 1995:2*) menyatakan bahwa warga negara demokratis adalah mereka yang menghargai ruang-ruang privat pihak lain dan melindungi kebebasan individu untuk memiliki kehidupan pribadi dengan syarat bahwa tindakan individu tersebut tidak mengganggu hak-hak individu lain yang melakukan hal yang sama.

II.4. Good Governance

Menurut Rachman Achwan, (*Dalam Rizal Gerhana Putra, Pelaksanaan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Anggota DPRD, 2008:18*) pada abad ke 21 ini terjadi “*manifesto politik universal yaitu good governance.*”

Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan intraksi yang konsultif di antara tiga dominan; Negara sektor swasta dan masyarakat (*society*).

Mishra dalam (Mudrajat Kuncoro 2004:271) menyatakan ada 10 prinsip Good Governance, yaitu:

1. **Partisipasi**, mendorong semua warga negara mengekspresikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung.
2. **Penegakan hukum**, menjaga agar penegak hukum dan perundangan adil dan tanpa diskriminasi, serta mendukung HAM dan memperhitungkan semua nilai yang ada dalam masyarakat.

3. **Taransparansi**, membangun saling kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dengan meberikan imformasi yang dibutuhkan dan akses imformasi yang mudah bila dibutuhkan.
4. **Responsip**, meningkatkan responsitas birokrat terhadap keluhan, masalah, dan aspirasi masyarakat tanpa terkecuali
5. **Pemerataan**, memberikan peluang yang sama bagi semua warga untuk meningkatkan kesejahteraannya.
6. **Visi Strategis**, mempromulasikan suatu strategi yang didukung dengan sistem penganggaran yang mencukupi, sehingga rakyat memiliki rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap masa depan daerah.
7. **Epektif dan Eepesiensi**, melayani masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan bijaksana.
8. **Propesionalisme**, meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan moral birokrat daerah sedemikin rupa sehingga mereka dapat pelayanan yang mudah, cepat, akurat, dan dapat dijangkau.
9. **Akuntabilitas**, meningkatkan akuntanbilitas pablik bagi para pengambil kebijakan dipemerintah, swasta dan organisasi masyarakat pada semua bidang (politik, fiskal dan anggaran).
10. **Pengawasan**, melakukan kontrol dan pengawasan atas administrsi publik dan aktivitas pembangunan dengan melibatkan masyaraka dan organisasi masyarakat.

Menurut **Robert O. Keohane**, (*Dadang Juliantara, Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik, 2005, halaman 156*). Akuntabilitas adalah suatu proses penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas yang dimaksud dalam tulisan ini adalah proses penyampaian laporan pertanggungjawaban terhadap tugas dan kinerja DPRD Kabupaten Natuna Daerah Pemilihan I terhadap tugas dan kinerjanya kepada pemilih di daerah pemilihannya masing-masing.

Akuntabilitas terbagi menjadi 2, yakni Akuntabilitas Internal dan Akuntabilitas Eksternal. Akuntabilitas internal adalah suatu laporan pertanggungjawaban yang disampaikan dalam intern kelembagaan atau instansi. Sementara akuntabilitas eksternal adalah suatu laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada mereka yang dalam kehidupan sehari-hari menjadi sasaran atau korban dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Mengapa akuntabilitas pemerintah daerah diperlukan?

Jawabannya cukup sederhana, pemerintah daerah adalah aktor utama dalam menjalankan fungsi-fungsi pokok pemerintahan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban seseorang atau badan hukum suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja atau tindakannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk menerima dan meminta jawaban serta penjelasan atas hasil seluruh tindakannya itu.

II.5. Demokrasi

Miriam Budiardjo, (2008:110), menyatakan bahwa demokrasi dianggap sebagai mekanisme politik yang terbaik dari yang pernah ada untuk mencapai kemakmuran rakyat. Demokrasi dianggap yang terbaik karena peran rakyat yang dominan sehingga apa yang terbaik adalah apa yang dianggap oleh rakyat yang terbaik.

Dalam bukunya **Soehino** (2004:243) menyebutkan tiga tipe demokrasi moderen yaitu:

1. Demokrasi, atau pemerintah perwakilan rakyat yang bersentatif, dengan Sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau sistem presidensial

2. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang refrensetatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi diantara badan-badan yang disertai kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan eksekutif ada hubungan yang bersipat timbal balik, dapat salaing mempengaruhi, atau sistem parlementil.
3. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang repsentatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan dan dengan kontrol secara langsung dari rakyat, yang disebut sistem referendum, atau sistem badan pekerjaan

Untuk membedakan demokrasi kuno dengan demokrasi langsung, maka demokrasi dengan badan perwakilan rakyat ini, dikatakan demokrasi moderen, demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan yang dalam instansinya terakhir dan tertinggi kekuasaan memutuskan ada pada rakyat, hanya saja pelaksanaanya yang berbeda dalam masing-masing tipe demokrasi moderen tersebut, dan pada umumnya kesukarannya terletak pada cara untuk mendapat arah politik yang sama dari badan legislatif dan dari badan eksekutif.

Ignas Kleden, (*Dadang Juliantara, Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik, 2005, hal. 155-156*), mengemukakan ada tiga alasan mendasar mengapa demokrasi dibutuhkan.

Pertama, demokrasi dapat memperkaya kehidupan individu karena memberi lebih banyak kebebasan dan menjamin bahwa kebebasan tersebut dapat dinikmati tanpa terhalang. Jaminan ini diberikan oleh hak-hak politik sipil seorang individu.

Kedua, demokrasi dapat menolong pemerintah yang berkuasa, karena memberikan insentif politik kepada pemerintah yang sanggup memberikan respon cepat kepada keluhan, tuntutan atau kebutuhan rakyat.

Ketiga, demokrasi juga mendorong lahirnya proses yang lebih terbuka dalam masyarakat untuk mengadakan berbagai dialog, diskusi, pertukaran pikiran, perdebatan, negosiasi dan bentuk-bentuk interaksi sosial politik lainnya.

Nikmatul Huda, S.H, M.Hum, (2005:123), pada dasarnya gagasan pembentukan sistem perwakilan dalam suatu penyelenggaraan negara itu dilatarbelakangi oleh teori demokrasi. Teori ini menjelaskan bahwa anggota masyarakat harus ikut ambil bagian atau berpartisipasi dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan. Dalam kehidupan penyelenggaraan negara dewasa ini, keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan kebijaksanaan tersebut dilakukan melalui sistem perwakilan, yaitu rakyat menunjuk wakil-wakilnya yang dipandang terpercaya untuk membawakan aspirasi mereka didalam pemerintahan. Praktik kehidupan pemerintahan seperti ini sering diistilahkan dengan sistem demokrasi perwakilan.

Telah menjadi suatu kenyataan, ketika para elite nasional dan seluruh bangsa Indonesia merumuskan bentuk negara dan pemerintahan pertama kali, BPUPKI dan PPKI pada 1945 secara formal menetapkan pilihan politik demokrasi sebagai satu-satunya yang mendasar dalam kehidupan politik Indonesia. Ketegasan terhadap pilihan demokrasi tersebut secara eksplisit terdapat dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Miriam Budiardjo, (2008:313), menyatakan bahwa demokrasi perwakilan (*representative democracy*) adalah bentuk pemerintahan dimana hak membuat keputusan-keputusan politik melalui wakil yang ditunjuk oleh rakyat.

Arend Lijphart, (*dalam buku Amir Makmur, S.H, M.Hum dan Reni Purnomosari, Lembaga Perwakilan Rakyat, 2005*), menyatakan bahwa unsur suatu negara demokrasi adalah lembaga perwakilan rakyat, karena rakyat tidak dapat mengartikulasi kepentingan-kepentingan

secara sendiri-sendiri, karena harus diwakilkan. Sesuai dengan hal tersebut maka perlu dibentuk lembaga perwakilan sebagai perwujudan demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Representation (perwakilan) yang dikenal adalah perwakilan yang bersifat politik (*political representation*), yaitu perwakilan rakyat melalui partai politik yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama orang yang memilih partai tersebut.

Menurut **Jellinek**, (*dalam* Afrizal Gerhana Saputra 2008: 20), timbulnya konstruksi perwakilan disebabkan oleh 3 hal yaitu:

1. Pengaruh berkembangnya Hukum Perdata Romawi di abad menengah yang menyebabkan timbulnya sistem perwakilan.
2. Adanya sifat dualistik pada abad menengah yaitu adanya hak raja dan hak rakyat. Hal ini mengakibatkan timbulnya perwakilan untuk mencerminkan hak rakyat.
3. Pada menengah meskipun tuan-tuan tanah itu merupakan pusat kekuasaan, sebenarnya kekuasaan itu tidak ada. Masalahnya kekuasaan pada masa itu merupakan hal yang diperebutkan antar tuan tanah.

II.6. Al-Qur'an dan al-Hadis

QS. Al-Anfaal:27“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Hadits riwayat al-Bukhari: Rasulullah Saw bersabda: Apabila suatu amanah, disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. (Abu Hurairah) bertanya: bagaimana meletakkan amanah itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab: Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.”

II.7. Hipotesis

Diduga kinerja DPRD Kabupaten Natuna periode 2004-2009 dalam melaksanakan fungsi Legislasi, Anggaran dan juga Pengawasan selama ini kurang baik, tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Natuna pada umumnya karena:

1. Tingkat pendidikan tidak memadai.
2. Kurangnya rasa tanggungjawab.
3. Kurang melihat kondisi dan keadaan masyarakat.
4. Kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat.
5. Kurangnya pengawasan masyarakat terhadap kinerja DPRD.
6. Media masa berpihak kepada pemerintah.

II.8. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut.

Untuk memudahkan penganalisaan dan menghilangkan kerancuan definisi tentang beberapa konsep, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional, yaitu:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya yang disebut dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna selanjutnya disebut sebagai DPRD Natuna adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ditingkat Kabupaten Natuna.
3. Pemerintah daerah adalah:
 - a. Pemerintahan Daerah Propinsi yang terdiri atas Pemerintah Daerah Propinsi dan DPRD Propinsi.

- b. Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.
4. Untuk melaksanakan Tugas dan wewenangnya, DPRD Kabupaten mempunyai tugas:
- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bupati/Walikota;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/walikota, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama Internasional di daerah;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
 - f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
5. Kinerja (perstasi kerja) adalah hasil kerja secara kulaitas dan kuntitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.
6. Faktor Kemampuan yaitu kemampuan (*abiliti*) terdiri dari potensi (IQ) dan kemampuan reliti (*knowledge dan skill*).

7. Faktor Motivasi, Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).
8. Lingkungan kerja (sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan).
9. Tanggungjawab adalah kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji-janji.
10. Transparansi adalah sikap sikap adanya keterbukaan akses bagi semua pihak yang berkepentingan pada informasi yang dibutuhkan, perundangan dan kebijakan Pemerintah Lokal.
11. Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pembuat kebijakan seperti pemerintah kepada publik atau *stake holders*.

II.9. Variabel Penelitian

Adapun variable dalam penelitian ini adalah “Kinerja DPRD Kabupaten Natuna, sedangkan yang menjadi indikatornya adalah fungsi utama DPRD. Fungsi utama DPRD Kabupaten adalah:

1. Fungsi legislasi yaitu membuat Peraturan Daerah, yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Fungsi anggaran yaitu kewenangan untuk menetapkan APBD bersama dengan kepala daerah.
3. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah. APBD, kebijakan pemerintah daerah dan melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

II.10. Tehnik pengukuran

Bila kita membahas mengenai kinerja DPRD Kabupaten Natuna, yang harus dilakukan adalah menentukan setandar keberhasilan dan standar kegagalan terlebih dahulu sehingga dengan adanya standar tersebut kita dapat mengukur apakah kinerja anggota DPRD Kabupaten Natuna baik atau tidak, untuk itu disini penulis akan membuat standar ukuran tersebut:

Kemudian dari tabel yang ada tersebut dapat dilihat bahwa untuk menentukan hasil dari penelitian, apakah kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna periode 2004-2009 sudah terlaksana dengan sangat baik atau pun tidak adalah dengan melihat jumlah tanggapan dari responden yang paling banyak.

Selain itu pendapat responden bukan lah satu-satunya sumber atau informasi dalam menentukan kinerja DPRD Kabupaten Natuna tetapi ada beberapa hal yang juga perlu untuk diperhatikan dan ditelaah seperti data yang bersangkutan dengan permasalahan dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di lapangan.

Untuk lebih jelasnya tabel respon akan penulis paparkan sebagai berikut

Table II. 1. Teknik Pengukuran

No	Indikator	Item yang dinilai/penilaian	Persentase				
			Sangat Baik	Baik	Cukup baik	Kurang baik	Tidak baik
1	Fungsi legislasi yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Natuna	1. Ada atau tidak Perda yang dibuat 2. Pengetahuan yang dimiliki tentang legislasi 3. Perda untuk kepentingan rakyat 4. Jumlah perda yang dibuat dalam 1 tahun 5. Perda yang dibatalkan Mendagri	Apabila sebagian besar responden menyatakan sangat baik	Apabila sebagian besar dari responden menyatakan baik	Apabila sebagian besar dari responden menyatakan cukup baik	Apabila sebagian besar dari responden menyatakan kurang baik	Apabila sebagian besar dari responden menyatakan tidak baik
2	Fungsi anggaran yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Natuna	1. Transparan dalam pengelolaan 2. Berdasarkan skala prioritas 3. Lembaga khusus masalah anggaran 4. Anggaran sesuai aturan 5. Penyusunan	Apabila sebagian besar dari responden menyatakan sangat baik	Apabila sebagian besar dari responden menyatakan baik	Apabila sebagian besar dari responden menyatakan cukup baik	Apabila sebagian besar dari responden menyatakan kurang baik	Apabila sebagian besar dari responden menyatakan tidak baik

		sesuai atau tidak dengan RKPD 6. Membuat pertanggungja waban yang dilakukan 7. Defisit dalam anggaran 8. Melakukan evaluasi 9. Pengesahan atas Kepentinganablik					
3	Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Natuna	1. Pelaksanaan perda 2. Peraturan bupati 3. Keputusan bupati 4. Pelaksanaan APBD 5. Kebijakan pemda dan melaksanakan program pembangunan daerah 6. Kerja sama Internasional di daerah. 7. Pinjaman daerah 8. pemungutan pajak/ ristribusu	Apabila sebagian besar dari responden menyatakan sangat baik	Apabila sebagian besar dari responden menyatakan baik	Apabila sebagian besar dari responden menyatakan cukup baik	Apabila sebagian besar dari responden menyatakan kurang baik	Apabila sebagian besar dari responden menyatakan tidak Baik

Suber data: olahan penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, yakni dengan mengumpulkan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian berlangsung untuk kemudian diproses dan dianalisis lebih lanjut berdasarkan teori yang ada. Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Adapun pada penelitian ini digunakan analisa data kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan mengikuti proses antara lain:

1. Reduksi data, dengan melakukan klasifikasi data dan menentukan kategori-kategori data yang diperoleh dan menempatkan pada kategori masing-masing.
2. Data tersebut diinterpretasikan secara mendalam dan tajam dengan berbagai sumber termasuk temuan-temuan lapangan. Data yang diperoleh juga bisa dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Sedangkan analisis deskriptif, yaitu sebuah analisa yang menjelaskan dan memaparkan kenyataan-kenyataan yang terjadi

III.2.. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kantor DPRD Kabupaten Natuna dan di daerah pemilihan I (satu) Anggota DPRD Kabupaten Natuna periode 2004-2009. dipilihnya dapil I (satu) yang menjadi area sampling dalam

penelitian ini karena didapil I (satu) tercatat sebagai daerah yang paling banyak pemilihnya yakni sebanyak 36.080 orang, dapil dua 10.931 orang dan dapil tiga sebanyak 25.757 orang. Adapun waktu dalam penelitian ini adalah pada tanggal 14 Desember 2009 sampai 14 Januari 2010

III.3. Pupulasi Dan Sample

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005, 90).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada pupulasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, mama peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2005, 91).

Dengan demikian teknik cuplikan (*sampling*) dalam penelitian ini bersifat (*purposive*), sehingga yang menjadi subyek penelitian (informan) adalah mereka yang dianggap dapat memberikan informasi yang memadai berkaitan dengan pertanyaan penelitian ini.

Oleh karenanya, terdapat beberapa subyek penelitian yang sengaja dipilih dan ditentukan peneliti sebagai sumber data. Subyek-subyek penelitian ini diantaranya:

1. Ketua DPRD Kabupaten Natuna.
2. Wakil I Ketua DPRD Kabupaten Natuna.
3. Beberapa Anggota DPRD Kabupaten Natuna dari daerah pemilihan I

4. Kepala bagian naskah dan dokumentasi DPRD Kabupaten Natuna.
5. Beberapa tokoh masyarakat.
6. Beberapa tokoh pemuda.
7. Masyarakat yang dipilih secara acak.

Informan ini terdiri dari:

1 orang Ketua DPRD Kabupaten Natuna, 1 orang Wakil I Ketua DPRD Kabupaten Natuna, 6 orang dari 9 orang Anggota DPRD Kabupaten Natuna daerah pemilihan I (satu), 1 orang Kabag naskah dan dokumentasi, 6 orang tokoh masyarakat, 6 orang tokoh pemuda dan 79 orang masyarakat dipilih secara acak.

Adapun cara penarikan sampel adalah dengan menggunakan rumus

Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

ket : n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e =Nilai krisis atau batas ketelitian yang diinginkan

Dimana tingkat kesalahan yang diambil sebesar 10% dengan jumlah masyarakat sebesar 36080 orang maka didapatkan sampel sebesar:

$$\begin{aligned} n &= \frac{36101}{1+ 36080 (0,1)^2} \\ &= \frac{36101}{362} \end{aligned}$$

= 99,726519 orang, dikenakan menjadi 100 orang

Untuk jelasnya siapa saja populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.1. Jumlah Informan Dalam Penelitian

No	Klasifikasi Informan	Populasi	Sample
1	Anggota DPRD Kabupaten Natuna	9	-

	- Ketua DPRD Kabupaten Natuna	1	1
	- Wakil I Ketua Dprd Kabupaten Natuna	1	1
	-Anggota DPRD Kabupaten Natuna Dapil I	9	6
2	Kepala Bagian Naskah dan Dokumentasi	1	1
3	Tokoh masyarakat	10	6
4	Tokoh pemuda	9	6
5	Pemilih	36.061	79
	Jumlah	36.101	100

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2009

III.4. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka jenis dan sumber data diperlukan adalah:

1. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang mendalam secara semi terstruktur yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan;
2. *Data Sekunder*, yaitu data dan informasi serta keterangan yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dari sekretariat DPRD Kabupaten Natuna dan sumber lainnya

III.5. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah diungkapkan diatas, Salah satu karakteristik dan kekuatan utama dari penelitian studi kasus adalah dimanfaatkannya berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. **Sugiono** (2007: 156) mengklasifikasikan enam sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian studi kasus seperti ini, yaitu: dokumen, catatan arsip, wawancara, pengamatan langsung, pengamatan berperan serta dan bukti fisik. Sebagai konsekuensi dari karakteristik studi kasus tersebut, semua teknik pengumpulan data yang memungkinkan dan relevan dengan pertanyaan penelitian akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Wawancara

yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan

Wawancara ini ditujukan kepada: 1 orang Ketua DPRD Kabupaten Natuna, 1 orang Wakil I Ketua DPRD Kabupaten Natuna, 6 orang dari 9 orang Anggota DPRD Kabupaten Natuna daerah pemilihan satu (dapil I) dan 1 orang Kepala Bagian naskah dan dokumentasi.

2. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode pengamatan secara langsung dan menggambarkan permasalahan yang sedang diamati sebagai objek kajian dari penelitian.

3. Kuosioner

Yaitu teknik pengumpulan data dengan metode memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/ Pernyataan kepada responden dengan harapan responden akan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.

Adapun kuesioner ini ditujukan kepada 6 orang tokoh masyarakat yang ada di dapil I, 6 orang tokoh pemuda yang ada di dapil I dan 79 orang masyarakat yang dipilih secara acak Jadi, total keseluruhan sample 100 orang

4. Studi dokumen

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan metode mengambil dokumen-dokumen atau bukti yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

BAB IV

PROFIL KABUPATEN NATUNA DAN DPRD KABUPATEN NATUNA

IV.1. Gambaran Umum Kabupaten Natuna

IV.1.1. Deskripsi Wilayah

Kabupaten Natuna terletak dPi antara 2°LU sampai dengan 5°LU dan dari 104°BT sampai dengan 110°BT, terdiri dari daratan dan perairan dengan luas wilayahnya mencapai 141.901 km² dengan luas daratan 3.235,2 km² dan lautan 138.666 km².

Wilayah Kabupaten Natuna terdapat 271 pulau besar dan kecil, tiga pulau besar diantaranya Pulau Bunguran, Pulau Jemaja dan Pulau Serasan.

Kabupaten Natuna memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Vietnam dan Kamboja;
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kepulauan Riau;
3. Sebelah Timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat;
4. Sebelah Barat dengan Semenanjung Malaysia dan Pulau Bintan Kabupaten Kepulauan Riau.

Berdasarkan kondisi geomorfologi, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Dataran rendah dan landai banyak ditemukan dipinggir pantai. Ketinggian wilayah antar kecamatan cukup beragam, berkisar antara 3 m sampai 300 m dari permukaan laut dengan kemiringan 2 sampai 5 derajat, serta ada beberapa tempat terdapat lereng yang terjal.

Sedangkan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan yang tanah dasarnya mempunyai bahan granit dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus.

Iklim di Kabupaten Natuna sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret dan Mei, ketika angin dari arah utara bertiup. Musim hujan terjadi pada bulan September sampai dengan Februari ketika arah angin bertiup dari Timur dan Selatan.

Curah hujan rata-rata setahun 2.000 mm³ dengan kelembaban udara sekitar 85% dan temperatur 25°, dengan suhu udara berkisar antara 21° - 34°.

IV.1.2. Demografi

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pendaftaran Kependudukan Kabupaten Natuna, jumlah penduduk Kabupaten Natuna 2009 sebesar 99.902 jiwa, yang terdiri atas laki-laki 52.030 dan perempuan 47.872 jiwa.

Kabupaten Natuna mempunyai 16 kecamatan yang dipisahkan oleh lautan. Diantara kecamatan yang ada, yang paling banyak jumlah penduduknya adalah kecamatan Bunguran Timur, yakni jumlah laki-laki sebanyak 13510 jiwa dan perempuannya sebanyak 12632 jiwa, jadi jumlah keseluruhannya adalah 26144 jiwa, sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Jemaja Timur yakni jumlah laki-laki sebanyak 470 jiwa dan perempuan sebanyak 458 jiwa, jadi jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 928 jiwa. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Desa-Kelurahan	Jumlah Penduduk Natuna Per Kecamatan		
			L	P	L+P
1.	Jemaja	8	3444	3126	6570
2.	Palatak	9	6359	5499	11858
3.	Siantan	4	4608	4194	8802
4.	Midai	4	2415	2337	4752

5.	Bunguran Barat	8	5649	5131	10780
6.	Serasan	9	3510	3379	6889
7.	Bunguran Timur	10	13512	12632	26144
8.	Bunguran Utara	6	1939	1767	3706
9.	Subi	6	1358	1299	2657
10.	Pulau Laut	3	933	909	1842
11.	Pulau Tiga	10	2303	2053	4356
12.	Jemaja Timur	4	470	458	928
13.	Siantan Selatan	4	1559	1528	3087
14.	Siantan Tmur	3	1280	1127	2407
15.	Bunguran Timut Laut	6	575	510	1085
16.	Bunguran Tengah	3	2116	1923	4039
Jumlah		97	52030	47872	99902

Sumber: Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Natuna 2009.

IV.1.3. Sosial Budaya dan Pendidikan

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Perkembangan di bidang pendidikan dari tahun ke tahun di Kabupaten Natuna menunjukkan tren kenaikan termasuk wilayah pesisirnya. Hal ini dapat terlihat melalui indikator-indikator kuantitas dan kualitas institusi pendidikan, jumlah guru, murid dan tingkat partisipasi sekolah dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2005/2006, Taman kanak-kanak berjumlah 25 sekolah, 1.133 murid dan 101 guru dengan rasio murid terhadap guru 11,22 dan rasio murid terhadap sekolah 45,32. Selanjutnya pada tahun yang sama Sekolah Dasar berjumlah 134 buah dengan 13.710 murid dan 997 guru, dengan rasio murid terhadap guru 13,75 dan murid terhadap sekolah 102,31.

Data pendidikan menengah yang terdapat di Kabupaten Natuna terbatas pada SLTP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan saja. Pada tahun 2005/2006 terdapat 30 SLTP, 16 SMA dan 3 SMK dengan jumlah murid SLTP 3.419, murid SLTA 2.414 serta murid SMK “hanya” 285 siswa.

Produk utama yang dihasilkan di Kabupaten Natuna berasal dari sektor pertambangan yang terdiri dari Minyak, Gas Alam dan Barang Tambang. Sektor utama lainnya adalah Pariwisata, Perkebunan Kelapa dan Cengkeh serta hasil Perikanan.

1. Pertambangan

Sektor pertambangan adalah potensi utama Kabupaten Natuna yang terdiri dari minyak, gas alam dan barang tambang. Hingga tahun 2005 terdapat 3 buah perusahaan minyak lepas pantai Conocophilips, Star Energy, dan Premeir Oil. Setidaknya terdapat 24 lokasi penggalian batu dan 22 lokasi penggalian pasir diseluruh kecamatan kecuali Kecamatan Jemaja, Serasan dan Bunguran Barat. Kecamatan yang memiliki peluang investasi terbesar adalah Bunguran Timur dengan 18 lokasi penggalian batu dan 17 lokasi penggalian pasir.

2. Industri

Pengembangan industri yang berkembang di Kabupaten Natuna terdiri dari industri makanan dan minuman, perkayuan dan produk kayu serta industri produk berbahan logam yang sebagian besar merupakan industri berskala kecil.

2. Pertanian

Komoditas hasil ladang yang paling banyak ditamani adalah ubi kayu dengan produksi sebanyak 870 ton. Selainitu juga terdapat Jagung, Kentang Manis, Talas, dan Kacang-kacangan. Pada tahun 2004, produksi sayur-sayuran seperti Kangkung,, Bayam dan Mostar mencapai lebih dari 600 ton, tanaman pisang mencapai 6.812 ton dan Nenas sebesar 17 ton.

3. Perkebunan

Komoditas unggulan dari sektor perkebunan yaitu Lahan Perkebunan Karet, Kelapa dan Cengkeh. Ketiga komoditas unggulan ini terdapat diseluruh kecamatan. Perkebunan kelapa terbesar berada di Kecamatan Siantan dan Palmatak.

4. Perternakan

Pada sektor perternakan, komoditas ternak yang diunggulkan adalah sapi yang dikembangkan di Bunguran Timur, Bunguran Barat dan Jemaja serta kambing yang dternakkan di setiap kecamatan. Potensi terbesar dalam perternakan di Kecamatan Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

5. Perikanan

Sektor Perikanan juga merupakan potensi utama di Kabupaten Natuna. Produksi ikan laut sebagian besar ditangkap di Perairan Bunguran Barat dan Bunguran Timur. Beberapa hasil laut seperti ikan dari jenis Napoleon, Kerapu, Tongkol, Sardin serta berbagai hasil laut lainnya seperti udang dan kepitingan

6. Pariwisata

Walaupun terdapat banyak potensi wisata yang ditunjang oleh keindahan alam dan keanekaragaman hayati, namun sektor pariwisata belum dikelola secara optimal. Beberapa peluang investasi dalam pengembangan wisata kini menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Natuna. Diantaranya peluang tersebut adalah objek wisata yang terdapat di Padang Melang, Pantai Bule Sun Di Kecamatan Jemaja, dan Pantai Sisi di Kecamatan Serasan yang didalamnya terdapat Air Celupan Tujuh Warna yang membutuhkan pengembangan resort, hotel/motel, cottage, restoran seafood, kafe, serta fasilitas rekreasi dan olah raga air.

IV.1.1. Pemerintahan

Dalam suatu institusi pemerintahan modern, perumusan visi dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting mengingat semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, peradaban masyarakat dan arus globalisasi, yang pada intinya telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal ini berarti bahwa pemerintah sebagai agen pembangunan (*Agent of Development*) semakin dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Selanjutnya dalam konteks otonomi daerah, sebagai mana dimandatkan dalam Undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah demi kesinambungan pembangunan semakin berat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mampu mengemban amanah pembangunan melalui pemanfaatan segenap potensi sumber daya yang ada di daerah secara efisien dan efektif. Untuk itu diperlukan perumusan visi dengan tepat.

Di sisi lain melalui perumusan visi tersebut, masyarakat akan dapat mengetahui seberapa jauh komitmen dan strategi Pemerintah Daerah untuk membangun dan mengembangkan berbagai aspek kehidupan mereka di masa yang akan datang, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan untuk bertindak dalam rangka memanfaatkan peluang sekaligus dapat mengantisipasi dampak negatif dari kemajuan dan perubahan peradaban dunia.

Secara konseptual, visi merupakan pandangan jauh ke depan dan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu institusi di masa depan. Penyusunan visi didahului dengan 5 I dan 1 F. Yang dimaksud dengan 5 I adalah Initiation, Ideas-idealism, Information, Identification dan Inception. Sedangkan yang dimaksud 1 F adalah Forecasting, yakni pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan.

Berdasarkan kajian 5 I dan 1 F tersebut, maka visi dalam membangun Kabupaten Natuna adalah *"Menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Riau Kepulauan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang handal untuk mewujudkan masyarakat madani, pada tahun 2020."*

Seluruh masyarakat Kabupaten Natuna berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Natuna sebagai "pusat pertumbuhan ekonomi di Riau Kepulauan" yaitu dapat berfungsi sebagai salah satu lokomotif pembangunan perekonomian di kepulauan riau, nasional maupun regional yang mampu meningkatkan kualitas taraf

hidup dan memberikan manfaat kesejahteraan/memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat.

Upaya yang akan dicapai untuk mewujudkan komitmen di atas adalah melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung dengan sumber daya yang handal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Melalui upaya tersebut di atas, maka seluruh masyarakat Kabupaten Natuna memiliki kesungguhan hati untuk "terwujudnya masyarakat madani". Madani dalam pengertiannya merupakan masyarakat yang agamis, berdaya, sopan santun, beradab dan berbudaya tinggi serta sejahtera dimana masyarakat tersebut dalam menghadapi berbagai permasalahan selalu dihadapi dengan sopan santun dan beradab serta mencari jalan keluar selalu melalui musyawarah. Pilar atau pranata yang harus dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat madani adalah adanya peran ulama atau ahli ilmu yang konsisten, umarah yang mengemban kepemimpinan, pelaku perekonomian masyarakat, pekerja dan rakyat yang loyal.

Misi merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian suatu visi, yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan strategi, prioritas kebijakan, penyusunan program dan pengalokasian sumber daya daerah. Untuk maksud tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - a. Taat melaksanakan dan mengamalkan agama serta menjadi annya landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - b. Memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan dapat menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan dan perluasan pendidikan dan budaya yang relevan dengan pembangunan daerah.
 - c. Memiliki derajat kesehatan (sehat jasmani dan rohani), memiliki keterampilan kerja dan tingkat kesejahteraan sosial yang memadai, sehingga dapat berperan dalam membangun daerah terutama mendukung pembangunan sektor industri berbasis komoditi perikanan, kelautan, komoditi perkebunan.
 - d. Sumber daya manusia aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat secara profesional, berdaya guna dan produktif.
 - e. Sumber daya manusia masyarakat yang produktif, kreatif, inovatif, berketrampilan.
2. Mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan.
 - a. Adanya landasan ekonomi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berbasis kekuatan ekonomi rakyat, meningkat dan meratanya pendapatan masyarakat dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor industri berbasis

komoditi perikanan (komoditi kelautan) dan komoditi perkebunan, sub-sektor perikanan dan sub-sektor perkebunan.

- b. Meningkatkan pembangunan ekonomi rakyat secara terpadu dan terencana serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, guna mendukung percepatan pengembangan industri berbasis komoditi perikanan (komoditi kelautan) dan komoditi perkebunan, sub-sektor perikanan dan sub-sektor perkebunan.
 - c. Tumbuhan dan berkembangnya usaha kecil, menengah, dan koperasi yang didukung pengusaha besar melalui kemitraan yang saling menguntungkan.
 - d. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya daerah secara bijaksana dan terencana guna mendukung pengembangan sektor industri berbasis komoditi perikanan (komoditi kelautan) dan komoditi perkebunan, sub-sektor perikanan dan sub-sektor perkebunan.
3. Meningkatkan sarana, prasarana dan pengembangan wilayah.
- a. Meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana transportasi antar wilayah guna mendukung percepatan upaya pengembangan sektor industri berbasis komoditi perikanan (komoditi kelautan) dan komoditi perkebunan, sub-sektor perikanan dan sub-sektor perkebunan.
 - b. Meningkatkan pengembangan potensi wilayah melalui pengembangan ekonomi wilayah, pengembangan wilayah strategis, pembangunan pedesaan dan perkotaan, pengembangan perumahan/pemukiman, pengembangan wilayah tertinggal, serta penataan ruang dan pengelolaan pertanahan berdasarkan konsep keseimbangan spasial dan berwawasan lingkungan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar daerah.

IV.2. Profil DPRD Kabupaten Natuna

1V.2.1. Kedudukan DPRD

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Adapun konfigurasi DPRD Kabupaten Natuna terdiri dari Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang berjumlah 20 orang dan anggota DPRD berdomisili di Ranai Ibukota Kabupaten Natuna.

DPRD Kabupaten Natuna memiliki fungsi, diantaranya:

- a. Fungsi Legislasi;
- b. Fungsi Anggaran;
- c. Fungsi Pengawasan.

IV.2.2. Tugas dan Wewenang DPRD

Adapun tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Natuna sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Natuna Nomor KPTS.14/DPRD/2007 pasal 72 yaitu:

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Kepala Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Keputusan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama Internasional di daerah
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah;

- f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;
- g. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

IV.2.3. Hak dan Kewajiban DPRD

IV.2.3.1. Hak DPRD

Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Natuna Nomor KPTS.14/DPRD/2007 pasal 73 menyebutkan bahwa DPRD mempunyai hak, diantaranya:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Selain itu, anggota DPRD juga memiliki hak, sebagaimana yang terdapat disebutkan dalam pasal 81 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Natuna Nomor KPTS.14/DPRD/2007, diantaranya:

- a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. protokoler;
- h. keuangan dan administratif.

IV.2.3.2. Kewajiban DPRD

Mengenai kewajiban anggota DPRD Kabupaten Natuna, diatur dalam pasal 87 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Natuna Nomor KPTS.14/DPRD/2007, diantaranya:

- a. mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- h. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggungjawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;
- i. menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
- j. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

IV.2.4. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Natuna

Untuk merealisasikan fungsi, tugas dan wewenang, hak DPRD dan hak anggota DPRD, kewajiban anggota, maka dibantu dengan berbagai alat kelengkapan dan pendukung, seperti yang diatur dalam Pasal 98 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003, yang selanjutnya dimuat dalam pasal 46 UU Nomor 32 Tahun 2004, serta lebih khusus dalam pasal 21 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Natuna Nomor KPTS.14/DPRD/2007, terdiri atas:

IV.2.4.1. Pimpinan

Pimpinan DPRD Kabupaten Natuna terdiri atas satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih oleh Anggota DPRD dalam Sidang Paripurna.

Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

- a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
- c. menjadi juru bicara DPRD;
- d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
- e. mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
- f. mewakili DPRD dan alat kelengkapan DPRD dipengadilan;
- g. melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD.

Demi memudahkan dan juga untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kinerja Pimpinan DPRD, maka diantara pimpinan diadakan pembagian tugas sebagai berikut:

- a. Ketua dan Wakil Ketua DPRD memimpin kegiatan DPRD sehari-hari;
- b. wakil-wakil ketua membantu ketua dalam menyelenggarakan kegiatan DPRD;
- c. ketua dan wakil ketua dapat menghadiri rapat-rapat komisi;
- d. apabila ketua berhalangan hadir, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh wakil ketua yang ditunjuk oleh ketua, dan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD;
- e. apabila ketua dan wakil ketua berhalangan tetap, rapat-rapat DPRD untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD yang terdiri atas seorang Ketua dan Seorang Wakil Ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD sampai terpilihnya Pimpinan DPRD baru.

IV.2.4.2. Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD, pada permulaan masa jabatan keanggotaannya. Panitia Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Keanggotaan Panitia Musyawarah dibentuk sedemikian rupa sehingga mencerminkan semua unsur-unsur fraksi dan komisi yang ada dalam DPRD. Ketua DPRD dan Para Wakil Ketua adalah *ex officio* anggota merangkap Ketua dan Wakil Ketua Panitia Musyawarah. Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Panitia Musyawarah mempunyai tugas:

- a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta;
- b. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
- c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- d. memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- e. merekomendasi pembentukan panitia khusus.

Selain itu, setiap anggota Panitia Musyawarah wajib:

- a. Mengadakan konsultasi dengan Fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Panitia Musyawarah.
- b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Panitia Musyawarah kepada Fraksi.

IV.2.4.3. Komisi

Komisi merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan melakukan kegiatan. Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD

wajib menjadi anggota salah satu Komisi. Keanggotaan DPRD dalam komisi diusulkan oleh Fraksi.

Jumlah Komisi pada DPRD Kabupaten Natuna diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Natuna KPTS.14/DPRD/2007 pasal 26-30 dan lebih khusus diatur dalam Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor KPTS.07/DPRD/2007 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Natuna masa jabatan 2004-2009. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel IV.2. Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Natuna

No	Nama komisi	Ruang Lingkup	Nama anggota	Jabatan Dalam Komisi
1.	Komisi I	Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Abdul Haris, S.H H. Sayed Nong Ali Mustamin Bakri, S.Sos Sabani, S.H	Ketua Wk.Ketua Sekretaris Anggota
2	Komisi II	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	H. Ibnu Hajar, S.Sos H. Nuzur S.T Yurnaidi, S.Sos H. Muhd. Isa Usman Asmirwan Daeng Amhar, S.E, MM Norbita Trihadi	Ketua Wk.Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
3.	Komisi III	Bidang Keuangan	H. Wahyudi Zulkarnain Drs. Tarmizi H. Abu Bakar Matrang Amat Yani Baharudin	Ketua Wk.Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2009

Komisi-komisi dalam DPRD Kabupaten Natuna terdiri dari:

- a. Komisi I, Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi: pemerintahan, ketertiban, keamanan, kependudukan, penerangan/pers, hukum/perundang-undangan, perizinan, pertahanan, kepegawaian/aparat, sosial politik dan organisasi masyarakat, pertahanan, agama, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, ketenagakerjaan, kepemudaan, olahraga dan sosial.

- b. Komisi II, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, meliputi : perindustriaan, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, pariwisata, dunia usaha dan penanaman modal, pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup.
- c. Komisi III, Bidang Keuangan, meliputi : keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan patungan dan sumbangan pihak ketiga dan BUMD.

Komisi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- b. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
- d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja/studi banding Komisi atau gabungan Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. mengadakan rapat kerja dan dengan pendapat;
- i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;

- j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

IV.2.4.4. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan secara fungsional dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna harus segera membentuk alat kelengkapan DPRD berupa Badan Kehormatan.

Jumlah dan komposisi pimpinan dan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Natuna masa jabatan 2004-2009, dapat dilihat dalam daftar tabel IV.2 sebagai berikut:

Tabel IV.3 Komposisi Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2004-2009

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	H. Mohd. Isa Usman	Ketua	Golkar Plus
2.	H. Abu Bakar Matrang	Wk. Ketua	PAN
3.	H. Sayed Nong Ali	Anggota	Bulan Bintang Reformasi
4.	Sekretaris Dewan	Karena Jabatannya dalam kedudukan adalah sebagai Sekretaris Badan Kehormatan DPRD Kab. Natuna.	

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2009

Adapun tugas dan fungsi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Natuna telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Natuna Nomor: KPTS.14/DPRD/2007 pasal 32 dan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor : KPTS.23/DPRD/2006 Tentang Pembentukan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2004-2009, diantaranya:

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;

- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian Anggota DPRD Antar Waktu sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- e. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD, rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

IV.2.4.5. Panitia Anggaran

Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Natuna terdiri atas Pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap Komisi dan utusan dari Fraksi yang berdasarkan pertimbangan dari jumlah Anggota yang berjumlah 20 orang.

Adapun tugas Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Natuna telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Natuna Nomor: KPTS.14/DPRD/2007 pasal 34 dan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor : KPTS.12/DPRD/2004 Tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2004-2009, diantaranya:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna;

- c. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Pra Rencana APBD, Rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Bupati;
- d. memberikan saran dan pendapat terhadap Rancangan Perhitungan Anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD;
- e. menyusun Anggaran Belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD.

Komposisi keanggotaan panitia anggaran DPRD Kabupaten Natuna masa jabatan 2004-2009, dapat dilihat dalam daftar tabel berikut:

Tabel IV.4. Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2004-2009

No	Nama Anggota	Jabatan
1.	H. Abdul Rahman Saary, S.Sos	Ketua merangkap anggota
2.	H. Mohd. Jamil	Wk. Ketua merangkap Anggota
3.	Wan Zuhendra	Wk. Ketua merangkap Anggota
4.	Abdul Haris, S.H	Wk. Ketua merangkap Anggota
5.	Daeng Amhar, S.E, MM	Anggota
6.	H. Nuzur, S.T	Anggota
7.	Mustamin Bakri, S.Sos	Anggota
8.	H. Wahyudi	Anggota
9.	Baharuddin	Anggota
10.	Zulkarnain	Anggota
11.	Asmirwan	Anggota
12.	Drs. H. Zukhrin	Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2009

IV.2.4.6. Panitia Legislasi

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah maka dibentuk Panitia Legislasi yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Panitia Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara. Jumlah Anggota Panitia Legislasi mempertimbangkan dari jumlah Anggota Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan

anggaran. Susunan keanggotaan, organisasi dan tata kerja Panitia Legislasi ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Legislasi dibantu oleh Sekretaris yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

Adapun tugas Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Natuna telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Natuna Nomor : KPTS.14/DPRD/2007 pasal 36 dan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor: KPTS.15/DPRD/2007 Tentang Pembentukan Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2004-2009, diantaranya:

- a. Mengkoordinasikan program legislasi daerah yang merupakan usul DPRD dengan program legislasi daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- b. menentukan prioritas Rancangan Peraturan Daerah yang harus dilaksanakan;
- c. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul DPRD;
- d. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
- e. melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah.

Komposisi pimpinan dan keanggotaan panitia legislatif DPRD Kabupaten Natuna masa jabatan 2004-2009, dapat dilihat dalam daftar tabel berikut:

Tabel IV. Komposisi Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislatif DPRD Kabupaten Natuna

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari Komisi
1.	Drs. Tarmizi	Ketua	Komisi III
2.	H. Ibnu Hajar, S.Sos	Wk. Ketua	Komisi II
3.	Amat Yani	Sekretaris	Komisi III
4.	Yurnaidi, S.Sos	Anggota	Komisi II
5.	Sabani, S.H	Anggota	Komisi I
6.	Nurbita Trihadi	Anggota	Komisi II
7.	H. Abu Bakar Matrang	Anggota	Komisi III
8.	H. Mohd. Isa Usman	Anggota	Komisi II
9.	H. Sayed Nong Ali	Anggota	Komisi I

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2009.

IV.2.4.7. Alat Kelengkapan Lain Lain yang Dibutuhkan

Selain alat kelengkapan yang telah saya uraikan diatas, ternyata DPRD Kabupaten Natuna dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan, berupa Panitia Khusus dan Tim. Kedua alat kelengkapan tersebut tidak tetap atau bersifat sementara apabila diperlukan. Panitia Khusus dan Tim terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan satu orang sekretaris yang dipilih oleh Anggota DPRD setelah mendengar pendapat dan pertimbangan dalam rapat Panitia Musyawarah dengan persetujuan melalui Rapat Paripurna.

IV.2.4.8. Kedudukan, Susunan dan Tugas Fraksi-Fraksi

Fraksi merupakan pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan partai atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

Fraksi memiliki tugas:

- a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan masing-masing;
- b. meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para anggotanya dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD;
- c. menyampaikan Pandangan Umum Anggota dan kata akhir Fraksi pada setiap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Komposisi Fraksi-fraksi dalam kelembagaan DPRD Kabupaten Natuna dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel IV.6. Komposisi Fraksi-Fraksi Dalam Kelembagaan DPRD Kabupaten Natuna
Periode 2004-2009

No	Fraksi	Jumlah Anggota
1.	Fraksi Golkar Plus	6
2.	Fraksi PAN	4
3.	Fraksi Bulan Bintang Reformasi	3
4.	Fraksi PDI Perjuangan	3

5.	Fraksi Gabungan	4
----	-----------------	---

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2009

IV.3. Identitas Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009

IV.3.1 . Anggota DPRD Kabupaten Natuna Berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang cukup kompleks, diperlukan kemampuan menyelesaikan suatu permasalahan dan kemampuan membuat kebijakan yang berkualitas. Anggota DPRD tidak cukup hanya memiliki persyaratan politis, tetapi juga memiliki persyaratan formal dan intelektual serta pengetahuan praktis tentang pemerintah daerah.

Dari segi tingkat pendidikan, anggota DPRD Kabupaten Natuna cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari tabel II.6 berikut ini:

Tabel IV.7. Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009 Berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SMU Sederajat	14	70 %
2.	Diploma	1	5 %
3.	S1	5	25 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2009

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Natuna periode 2004-2009, yang paling tinggi adalah tamatan perguruan tinggi sebanyak 5 orang atau 25%, sedangkan tingkatan pendidikan yang paling rendah adalah tamatan Sekolah Menengah Umum atau sederajat.

IV.3.2. Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009 Berdasarkan Tingkat Usia

Anggota DPRD Kabupaten Natuna jika dilihat dari tingkat usia, berkisar antara 35-73 tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.8. Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009 Berdasarkan Tingkat Usia

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	35-39 Tahun	6	30 %
2.	40-49 Tahun	8	40 %
3.	50-59 Tahun	2	10 %
4.	60-69 Tahun	2	10 %
5.	70-73 Tahun	2	10 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2009

IV.3.3 Anggota DPRD Kabupaten Natuna Berdasarkan Jenis Kelamin

Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.9. Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	20	100
2.	Perempuan	0	0
Jumlah		20	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2009

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1. Identitas Responden

Sebelum dilakukan pembahasan terhadap hasil penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan identitas responden guna mendapatkan informasi yang akurat dalam menganalisa data yang akhirnya dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya. Adapun identitas responden yang diidentifikasi sebagai berikut :

V.1.1 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Melalui pendidikan yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkesinambungan akan membentuk serta mengembangkan kepribadian dan kemampuan seseorang. Pendidikan yang pernah dimiliki seseorang cenderung mempengaruhi kepribadian, kemampuan, wawasan dan pola pikir seseorang.

Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula keahlian, daya pikir dan wawasan yang dimilikinya. Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.1.. Jumlah Responden Penelitian masyarakat yang mengisi quisioner berdasarkan tingkat pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Tidak Tamat SD	-	-
2.	Tamat SD	10	11 %
3.	Tamat SLTP	20	22%
4.	Tamat SLTA	30	33 %
5.	Tamat Akademi	15	16,48
6.	Tamat Perguruan Tinggi	16	17,58
	Jumlah	91	100 %

Sumber : Data Olahan, 2009

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden yang paling tinggi adalah tamatan Perguruan Tinggi yakni 16 orang atau 17,58% sedangkan yang paling rendah adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) yakni 10 orang atau 11%. Dengan demikian semakin baiknya tingkat pendidikan responden, diharapkan jawaban-jawaban yang diberikan akan lebih rasional dan objektif.

V.1.2. Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan berfikir seseorang dan juga menentukan pengalaman kerja seseorang dalam menentukan hal apa yang semestinya dilakukan dalam hidupnya, semakin dewasa seseorang maka pikiran dan tindakannya cenderung pula dapat dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelasnya tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2. Jumlah Responden Penelitian masyarakat yang mengisi kuisisioner berdasarkan tingkat umur

No	Tingkat Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase
1.	17 – 25	15	16,48%
2.	26 – 35	35	38,46 %
3.	36 – 49	30	33 %
4.	> 50	16	17,58 %
	Jumlah	91	100,00 %

Sumber: Data Olahan, 2009

Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kebanyakan dari responden berumur antara 26-35 tahun yakni 35 orang atau 38,46% sedangkan yang paling sedikit adalah berumur antara 17-25 tahun yakni 15 orang atau 16%.

Dari data tabel diatas terlihat masing-masing kelompok responden tersebut sudah dikatakan dewasa dalam menentukan suatu keputusan sehingga dalam mengambil keputusan responden tidak lagi mudah dipengaruhi orang lain dan secara kejiwaan mempunyai kematangan emosi sehingga setiap informasi yang diperoleh dari mereka lebih objektif untuk dapat menggambarkan keadaan berdasarkan fakta yang sebenarnya di lapangan.

V,1.3. Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Untuk mengetahui identitas responden tentang jenis pekerjaannya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.3. Jumlah Responden yang mengisi quisioner berdasarkan pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pedagang	10	11 %
2	Petani	5	5,49%
3	Nelayan	15	16,48 %
4	Pegawai Negeri Sipil	20	22%
5	Peternak	7	8 %
6	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil	4	4,39
7	Lain-lain	30	33 %
	Jumlah	91	100 %

Sumber: Data Olahan 2009

Dari data tabel di atas menggambarkan bahwa kebanyakan dari responden bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni berjumlah 20 orang atau 22% sedangkan yang paling sedikit adalah bekerja sebagai Petanai yakni 5 orang atau 5,49%.

V.2. Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Adapun konfigurasi DPRD Kabupaten Natuna terdiri dari Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang berjumlah 20 orang dan anggota DPRD berdomisili di Ranai Ibukota Kabupaten Natuna.

DPRD selaku perwakilan masyarakat di daerah, seharusnya ia bekerja untuk rakyat dan lebih mementingkan keinginan rakyat dari pada yang lainnya. Mereka-mereka yang duduk di DPRD itu semata-mata kepercayaan yang diberikan rakyat kepada mereka untuk memikirkan tentang daerah mereka agar menjadi daerah yang dapat dibanggakan dan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Bagi orang-orang yang paham tentang tugas dan kewajiban ini, maka mereka akan sungguh-sungguh untuk mewujutkannya.

Dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengolah dan mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut, baik dari segi potensi alam yang dimiliki, sumber daya manusia (SDM) dan lain sebagainya, yang itinya adalah bagaimana seluruh daerah-daerah yang berada di Indonesia bisa bangkit dan berkembang dalam bidang pemerintahan, perekonomian, pendidikan, teknologi serta bidang-bidang lainnya.

Natuna merupakan salah satau daerah yang ada di Indonesia yang khususnya berada dalam kawasan Provinsi Kepulauan Riau. Natuna dikenal dengan daerah yang kaya akan hasil alam, laut, hutan dan ban minyak dan Migas Natuna akan menjadi daerah yang kaya, makmur dan bahkan akan pesat perkembangannya dari daerah-daerah yang lainnya , jika ditata dan ditangani oleh orang-orang yang pintar dan mempunyai tanggungjawab yang tinggi terhadap daerahnya

Oleh karena itu DPRD Kabupten Natuna selaku badan penyeimbang dari semua kegiatan yang akan dikembangkan di natuna sanagat mempunyai peran yang penting dan penentu. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Natuna Nomor KPTS.14/DPRD/2007 Pasal 71 menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Natuna mempunyai fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, yang dimana fungsi ini sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya Kabupaten Natuna.

Untuk menegetahua kapasitas dari kinerja yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Natauna selama periode 2004-2009, maka disini penulis akan melakukan pembahasan dan penelaahan terhadap fungsi yang dimiliki DPRD Kabupaten Natuna.

V.2.1. Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Natuna

Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan.

Fungsi legislasi bermakna penting dalam beberapa hal berikut:

- a. Menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah.
- b. Dasar perumusan kebijakan publik di daerah.
- c. Sebagai kontrak sosial di daerah.
- d. Pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Disamping itu, dalam menjalankan fungsi legislasi ini DPRD berperan pula sebagai *policy maker*, dan bukan *policy implementer* di daerah. Artinya, antara DPRD sebagai pejabat publik dengan masyarakat sebagai *stakeholders*, ada kontrak sosial yang dilandasi dengan *fiduciary duty*. Dengan demikian, *fiduciary duty* ini harus dijunjung tinggi dalam setiap proses fungsi

legislasi. Dalam praktik dan realita saat ini, proyeksi *good public governance* pada fungsi legislasi saat ini masih membutuhkan banyak penataan dan transformasi ke arah yang lebih baik.

Berikut ini adalah tabel mengenai pengukuran tingkat pelaksanaan kinerja DPRD Kabupaten Natuna 2004-2009 dalam bidang legislasi, dengan memberikan kuosioner yang diajukan kepada responden dengan pertanyaannya adalah:

Tabel V.4. Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah membuat peraturan daerah dengan baik

No	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat baik	Baik	Cukup baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Tokoh Masyarakat	1	3	2	0	0	6
2	Tokoh Pemuda	1	4	1	0	0	6
3	Masyarakat Biasa	11	33	24	9	2	79
Jumlah		13	40	27	9	2	91
Persentase		13	44	30	10	2,19	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas maka dapat dikategorikan bahwa DPRD Kabupaten Natuna sudah membuat perda dengan baik, karena dari 91 responden yang menyatakan baik adalah 40 orang atau 44%, sedangkan yang menyatakan tidak baik adalah hanya 2 orang atau 2,12%.

Peraturan Daerah merupakan dasar suatu daerah untuk melakukan suatu kegiatan, dengan perda yang ada maka suatu daerah akan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Oleh karena itu perda harus dibuat dengan secepat dan setepat mungkin agar semua kegiatan bisa dijalankan dalam rangka memajukan dan menuju daerah yang maju, makmur dan sejahtera.

Perda yang baik dan berkualitas sangat menentukan kemajuan suatu daerah jika disertai dengan aplikasinya yang sempurna, oleh karena itu setiap perancangan perda maka yang harus diperhatikan adalah keadaan daerah tersebut sehingga perda yang dibuat dapat diaplikasikan

sesuai dengan visi dan misi daerah tersebut. Jika perda yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang berada di daerah tersebut maka akan susah dan akan banyak mengalami kendala dalam menjalankannya.

Table V.5. Sejauh mana pengetahuan DPRD Kabupaten Natuna tentang peraturan daerah

No	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat baik	Baik	Cukup baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Tokoh Masyarakat	1	3	1	1	0	6
2	Tokoh Pemuda	1	2	2	1	0	6
3	Masyarakat Biasa	20	30	15	10	2	79
Jumlah		7	18	18	38	10	91
Persentase		8	20	20	42	11	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas terhadap pengetahuan DPRD Kabupaten Natuna tentang perda dapat dikategorikan kurang baik, karena dari 91 orang responden yang menyatakan kurang baik adalah 38 orang atau 42%, sedangkan yang menyatakan sangat baik hanya 7 orang atau 8%.

Pandangan responden ini merupakan tolak ukur peneliti dalam menganalisa permasalahan yang ada, jika dilihat dari segi pendidikan formal yang dijalankan oleh anggota DPRD Begitu menyakinkan tetapi, pengetahuan yang mereka miliki hanya bersifat pengalaman dalam berorganisasi baik itu diorganisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan, ini dikuatkan oleh wawancara penulis dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Natuna.

"Di DPRD Kabupaten Natuna kapasitas orang yang memiliki pendidikan formal yang tinggi sedikit, hanya beberapa orang saja, tetapi mereka-mereka yang duduk di DPRD adalah orang-orang telah berpengalaman dalam bidang organisasi, baik itu di organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan. Natuna adalah daerah yang baru berkembang dan daerahnya jauh dari daerah-daerah yang sudah berkembang duluan seperti Batam, Tanjung Pinang dan Pekanbaru lagi pula transportasi dahulunya sangat jarang ke Natuna, berbeda dengan sekarang udara dan laut sudah mudah untuk didapatkan, kami berharap natuna akan lebih maju dimasa yang akan datang dengan hadirnya generasi-generasi yang punya potensi baik dari segi pengalaman berorganisasi maupun pendidikan formal yang tinggi, kalian adalah putra daerah,

sekolah tinggi-tinggi dan pulanglah kedaerah kemudian bangun daerah kita ini” (Wawancara dengan H, Sayed Nong Ali tanggal 25 Desember 2009)

Tabel V.6. Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah membuat peraturan daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat

No	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat sesuai	sesuai	Cukup sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai	
1	Tokoh Masyarakat	1	2	1	1	1	6
2	Tokoh Pemuda	1	2	2	1	0	6
3	Masyarakat Biasa	23	34	10	13	0	79
Jumlah		25	38	12	15	1	91
Persentase		27,47	42	13,18	16,46	1,09	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas terhadap perda dibuat atas dasar kepentingan masyarakat, maka dapat dikategorikan sesuai. Karena dari 91 orang responden yang menyatakan sesuai adalah 38 orang atau 42%, sedangkan tanggapan yang menyatakan tidak sesuai adalah hanya 1 orang atau 1,09%.

Peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Natuna hampir tidak berseberangan dengan kepentingan masyarakat, oleh karena itu perda yang dibuat tidak pernah bermasalah terhadap masyarakat, tetapi yang menjadi masalah adalah perakteknya dilapangan.

Table V.7. Apakah peraturan daerah yang dibuat setiap tahunnya sering dibatalkan oleh Mendagri

No	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat sering	sering	Jarang	Kurang	Tidak pernah	
1	Tokoh Masyarakat	1	3	2	0	0	6
2	Tokoh Pemuda	0	3	2	1	0	6
3	Masyarakat Biasa	12	34	26	5	2	79
Jumlah		13	40	30	6	2	91
Persentase		14,28	44	34,06	7	2,19	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas terhadap pembatalan perda oleh Mendagri maka dapat dikategorikan sering, karena dari 91 orang responden yang paling banyak menyatakan sering adalah 40 orang atau 44%, sedangkan yang menyatakan tidak pernah hanya 2 orang atau 2,19%.

Setiap perda yang dibuat oleh daerah harus berdasarkan ketentuan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena Pancasila merupakan Ideologi bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan negara Indonesia dalam menentukan arah perjalanan Indonesia dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Oleh karena itu setiap perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Natuna harus bersesuaian dengan Ideologi dan landasan Bangsa Indonesia, jika ada pembutan perda yang tidak sesuai dan bertentangan dengan landasan tersebut maka perda tersebut akan mengalami pembatalan dan penghapusan oleh Mandagri.

Table V.8. Apakah jumlah peraturan daerah yang ada sudah memenuhi standar

No	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat sudah	Sudah	Cukup	Kurang	Tidak	
1	Tokoh Masyarakat	0	3	1	1	1	6
2	Tokoh Pemuda	0	2	3	1	0	6
3	Masyarakat Biasa	20	37	19	4	0	79
Jumlah		20	42	22	6	1	91
Persentase		22	46,15	24,17	7	1,09	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden diatas terhadap jumlah perda yang dibuat setiap tahunnya maka dapat dikategorikan sudah , karena dari 91 orang responden yang menyatakan sudah adalah 37 orang atau 46,15%, sedangkan yang menyatakan tidak hanya 1 orang atau 1,09.

Jumlah perda yang dibuat harus sesuai dengan target yang telah direncanakan, karena dari semua perda yang dibuat mempunyai potensi dan bidang masing-masing, jika perda telah dikerjakan dengan maksimal maka semua unsur yang berada didalamnya akan ikut sempurna, sehingga dalam menjalankan perda tersebut bisa lebih terarah. Perda yang dibuat sesuai dengan perencanaan maka tidak akan terjadi ketimpangan dalam menjalankannya antara bidang yang satu dengan yang lainnya, sehingga pembangunan yang seimbang akan dapat diwujudkan. Dimasa pemerintahan DPRD periode 2004-2009 jumlah perda yang telah dibentuk adalah berjumlah 82 buah.

Fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Natuna, jika dilihat dari penilaiannya responden yang berada di Kabupaten Natuna di dapi I berdasarkan dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penulis khususnya pertanyaan yang berhubungan dengan Fungsi legislasi DPRD Kabuapten Natuna, maka dapat disimpulkan kinerja mereka dalam bidang legislasi adalah "Baik". Tanggapan responden ini diperkuat dengan bukti yang ada yaitu:

- a. Masyarakat merasa puas terhadap perda yang telah dibuat DPRD Kabupaten Natuna.
- b. Jumlah perda yang telah diterbitkan DPRD Kabupaten Natuna selama 5 tahun kinerjanya adalah 82 perda
- c. Ada beberapa perda berasal dari inisiatif dari DPRD seperti dibidang perikanan,

V.2.2. Fungsi Anggaran DPRD Kabupaten Natuna

Fungsi penganggaran merupakan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif & sebagai legitimator usulan APBD ajuan pemerintah daerah

Fungsi penganggaran ini perlu memperoleh perhatian penuh, mengingat makna pentingnya sebagai berikut:

1. APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, & fungsi stabilisasi).
2. APBD sebagai fungsi investasi daerah.
3. APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (fungsi perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan).

Dalam konteks *good governance*, maka peran serta DPRD harus diwujudkan dalam tiap proses penyusunan APBD dengan menjunjung *fiduciary duty*. Prinsip-prinsip universal *good governance* dalam konteks GCG, yaitu *TARIF/RAFIT principles*, sangat tepat apabila dapat diterapkan secara nyata dalam menjalankan fungsi penganggaran ini.

Adapun *good public governance* pada fungsi penganggaran saat ini dapat lebih berperan secara konkrit apabila memperoleh perhatian dan kecermatan dalam beberapa hal berikut:

1. Penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD), antara lain:
 - a. Efektifitas pembentukan jaring asmara
 - b. Eliminasi kepentingan individu, kelompok, dan golongan
 - c. Pembenahan penyusunan RPJMD dan Renstra-SKPD
 - d. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan KUA
2. Penyusunan PPAS, antara lain:
 - a. Akuntabilitas terhadap nilai anggaran;
 - b. Kelengkapan data-data pendukung;
 - c. Peningkatan kapasitas anggota DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun prioritas urusan dan program; Kesesuaian antara prioritas program dengan kebutuhan rakyat;

3 Raperda APBD;

4 Sosialisasi Perda APBD;

Berikut ini adalah tabel mengenai pengukuran tingkat pelaksanaan kinerja DPRD Kabupaten Natuna 2004-2009 dalam bidang anggaran, dengan memberikan kuosioner yang diajukan kepada responden dengan pertanyaannya adalah:

Table V.9. Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah trnsparan dalam masalah APBD

No	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat sudah	Sudah	Cukup	Kurang	Tidak	
1	Tokoh Masyarakat	0	0	0	3	2	6
2	Tokoh Pemuda	0	0	0	4	2	6
3	Masyarakat Biasa	2	4	20	54	0	79
Jumlah		2	4	20	61	4	91
Persentase		2,19	4,39	22	67,03	4.39	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas terhadap transparannya DPRD Kabupaten Natuan dalam pengelolaan APBD, maka dapat dikatagorikan kurang, karena dari 91 orang responden yang menyatakan kurangnya transparan dalam masalah APBD adalah 54 orang atau 61%, sedangkan yang menyatakan sangat sudah hanya 2 orang atau 2,19%.

Masalah APBD sangat sensitif untuk di analisa, karena setiap orang yang berhubungan dengan anggaran maka sangat sulit untuk mendapatkan penjelasan yang jelas dan mendalam. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good govermenec), maka pengelola pemerintah baik dari tingakat pusat sampai daerah harus menerapkan sistem tranparan dalam segala kegiatan yang dialankan dan dilaksanakan, terutama keteransparan dalam masalah anggran baik anggaran dipemerintah pusat maupun di daerah, karena dengan hal tersebut maka dapat

menghindari penyalahgunaan anggaran yang tidak tidak pada tempatnya, dan juga dengan terbentuknya transparan tersebut maka akan menghindari perasangka buruk dari beberapa kalangan organisasi dan masyarakat. Sehingga antara semua pihak yang berada di dalam pemerintahan tersebut tumbuh rasa saling percaya dan saling menghargai dalam menjalankan kegiatan masing-masing.

Table V.10. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah penyusunan APBD sudah dilakukan dengan skala prioritas

No	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat sudah	sudah	Cukup	Kurang	Tidak	
1	Tokoh Masyarakat	0	0	1	3	2	6
2	Tokoh Pemuda	0	0	1	3	2	6
3	Masyarakat Biasa	2	5	25	44	3	79
Jumlah		2	5	27	50	7	91
Persentase		2,19	5,49	30	55	8	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden diatas terhadap penyusunan anggaran berdasarkan skala prioritas maka dapat dikategorikan kurang, karena dari 91 orang responden yang menyatakan kurang adalah 50 orang atau 55%, sedangkan yang menyatakan sangat sudah hanya 2 orang atau 2,19%.

Natuna merupakan daerah yang baru berkembang, masih banyak fasilitas-fasilitas yang kurang dalam mendukung kemajuan suatu daerah, maka ketika rencana pembangunan setiap tahunnya DPRD harus betul-betul melihat apa yang pantas untuk didahulukan, karena setiap anggaran yang dikurangkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya sangat terbatas sehingga dibutuhkan pengaturan yang tepat dan mantap. Jika skala prioritas ini tidak dilakukan oleh DPRD maka akan timbul ketimpangan dalam berbagai kegiatan sehingga kemajuan dan tujuan yang diinginkan sangat sulit untuk diwujudkan. DPRD selaku badan yang mengolah anggaran setiap

tahunnya harus betul-betul mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhapa keberhasilan pemabangunan yang ada pada suatu daerah.

Pada umumnya setiap daerah menginginkan perkembangan dan kemajuan yang pesat dalam segala bidang, tetapi dalam proses pengolahan yang salah maka hasil yang didapatkan pun sangat buruk, terutama penolahan yang berhubungan dengan anggaran sangat dibutuhkan kesungguh-sungguhan, rasa tanggung jawab yang tinggi dan yang sangat penting adalah kejujuran yang timbul dari dalam hati setiap yang melakukannya hal tersebut.

Table V.11. Apakah panitia anggaran yang dibentuk DPRD sudah bekerja dengan makasimal

No	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat sudah	Sudah	Cukup	Kurang	Tidak	
1	Tokoh Masyarakat	0	0	0	5	1	6
2	Tokoh Pemuda	0	0	1	3	2	6
3	Masyarakat Biasa	0	12	23	44	0	79
Jumlah		0	12	24	52	3	91
Persentase		0	13,18	26,37	57,14	3,29	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas dapat dijelaskan bahwa kerja yang dilakukan oleh panitia anggaran maka dapat dikatagorikan kurang, karena dari 91 orang responden yang menyatakan kurang adalah 44 orang atau 52%, %, sedangkan yang menyatakan sangat sudah tidak ada.

Adapun tugas panitia anggran adalah:

- 1 Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- 2 memberikan saran dan pendapat kepada dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna;

- 3 memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Pra Rencana APBD, Rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Bupati;
- 4 memberikan saran dan pendapat terhadap Rancangan Perhitungan Anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD;
- 5 menyusun Anggaran Belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD.

Apabila tugas yang telah diembankan kepada mereka dijalankan dengan maksimal maka proses penyusunan dan penetapan anggran yang ada akan berjalan dengan lancar dan poin-poin penting yang dianggap masalah dalam anggaran dapat dicarikan sosulinya. Panitia anggaran ini sanngat berpengaruh terhadap fungsi anggarang yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Natuan, oleh karena panitia anggaran tidak maksimal dalam menjalankan kerja sebagai pembantu maka, kinerja DPRD Kabupaten Natuan pun tidak dapat dijalankan dengan maksimal.

Anggran yang ada i kabupaten Nataua setaip tahunya cukup besar maka pengelolaannya juga harus betul-betul cermat dan teliti anggar pembangunan yang ada tepat sasarn dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat

Table V.12.. Apakah APBD yang ada telah digunakan sesuai aturan

N o	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat sesuai	Sesuai	Cukup	Kurang sesuai	Tidak pernah	
1	Tokoh Masyarakat	0	0	1	4	1	6
2	Tokoh Pemuda	0	0	0	5	1	6
3	Masyarakat Biasa	0	9	28	42	1	79
Jumlah		0	9	28	51	3	91

Persentase	0	10	31	56,04	3,29	100
------------	---	----	----	-------	------	-----

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas terhadap kerja yang dilakukan oleh panitia anggaran maka dapat dikategorikan kurang sesuai, karena dari 91 orang responden yang menyatakan kurang sesuai adalah 51 orang atau 56,04%, sedangkan yang menyatakan sangat sesuai tidak ada.

Pengelolaan APBD harus sesuai pada aturannya, karena aturan yang dibuat merubakan landasan dalam menggunakan APBD, apabila semua kegiatan sudah berada aturan yang telah ditentukan maka hasil yang maksimal pun akan didapatkan, tapi sebaliknya apabila pengelolaan ini tidak pada aturannya bukan hasil yang didapatkan tetapi masalah-masalah yang akan bermunculan.

Di Kabupaten Natuna pengelolaan APBD yang dilakukan kurang sesuai pada aturannya, sehingga banyak timbul permasalahan yang berhubungan dengan APBD, seperti penyelewengan anggaran yang tidak jelas kemana arahnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Seharusnya DPRD sebagai wakil masyarakat dipemerintahan, melakukan kegiatan atas dasar kepentingan masyarakat dan demi mewujudkan perkembangan daerah, jika itu dilakukan maka, penyelewengan anggaran pun tidak akan terjadi.

Table V.13. Apakah rancangan APBD yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Natuna sesuai dengan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

No	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat sesuai	Sesuai	Cukup sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai	
1	Tokoh Masyarakat	0	0	0	3	3	6
2	Tokoh Pemuda	0	0	0	3	3	6
3	Masyarakat Biasa	0	2	30	50	0	79
Jumlah		0	2	30	56	3	91

Persentase	0	2,19	33	62	3,29	100
------------	---	------	----	----	------	-----

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas terhadap rancangan APBD dengan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka dapat dikategorikan kurang sesuai, karena dari 91 orang responden yang menyatakan kurang sesuai adalah 56 orang atau 62%, sedangkan yang menyatakan sangat sesuai tidak ada

APBD yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada daerah setiap tahunnya bertujuan agar daerah dapat melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tujuan pemerintah yang telah direncanakan, baik itu pertumbuhan dari segi fisik maupun non fisik.

Rancangan APBD yang dilakukan oleh DPRD harus sesuai dengan rencana kerja daerah, karena anggaran tersebut sangat dibutuhkan dalam menjalankan rencana kerja pemerintah daerah, jika hal itu tidak terlaksana maka daerah tidak akan pernah mengalami perkembangan yang pesat. Banyak permasalahan-permasalahan yang akan timbul sehingga daerah tersebut akan mengalami keterpurukkan dalam berbagai bidang kehidupan.

able V.14. Apakah DPRD telah melakukan pertanggungjawaban masalah APBD dengan maksimal

No	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat sudah	sudah	Cukup	Kurang	Tidak pernah	
1	Tokoh Masyarakat	0	0	0	3	3	6
2	Tokoh Pemuda	0	0	0	4	2	6
3	Masyarakat Biasa	0	11	40	26	2	79
Jumlah		0	11	40	33	7	91
Persentase		0	12,08	44	36,26	8	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas terhadap pertanggungjawaban DPRD masalah APBD ,maka dapat dikategorikan cukup, karena dari 91 orang responden yang menyatakan cukup adalah 40 orang atau 44%, sedangkan yang menyatakan sangat sudah tidak ada.

Hal ini menunjukan bahwa DPRD ada keseruan dari DPRD dalam mempertanggungjawabkan permasalahan anggaran walupun, pertanggungjawabn tersebut masih belum maksimal. Didalam pertanggungjawaban tersebut DPRD membuat laporan atas anggaran yang telah digunakan dalam periode tertentu. Memegang laporan pertanggungjawaban yang dilakukan sudah dikerjakan tetapi, pertanggungjawaban tersebut tidak cukup sampai disitu saja tetapi harus dilakukan evaluasi agar tidak terjadi penyelewengan anggaran yang tidak diinginkan. Masalah anggran sangat sensitif, jadi harus senantiasa dilaporkan agar tika menimbulkan kecurigaan dan buruk sangka.

Table V.15. Apakah penyusunan APBD sering mengalami defisit setiap tahunnya

N o	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Tidak pernah	kurang	Kadang- kadang	sering	Sangat sering	
1	Tokoh Masyarakat	0	0	1	3	2	6
2	Tokoh Pemuda	0	0	1	4	1	6
3	Masyarakat Biasa	0	9	34	32	0	79
Jumlah		0	9	36	39	7	91
Persentase		0	10	40	43	8	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas terhadap defisit dalam masalah APBD, maka dapat dikategorikan sering, karena dari 91 orang responden yang menyatakan sering adalah 39 orang atau 43%, sedangkan yang menyatakan tidak pernah tidak ada.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan atau target yang hendak dicapai tidak begitu terapkan. Setiap daerah menginginkan perkembangan yang begitu pesat dalam segala bidang, sehingga anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat akan senantiasa mengalami kekeurangan dan dengan kekurangan tersebut setiap tahunnya banyak pembangunan yang tertunda menunggu anggaran tahun depannya.

Perkembangan di Kabupaten Natuna pada saat sekarang tidak begitu besar, tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya. Natuna daerah kaya akan hasil alamnya, tetapi pembangunannya pun masih tidak begitu nampak, dengan kondisi seperti ini mengundang kecurigaan terhadap orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan di Natuna, khususnya terhadap DPRD selaku perwakilan masyarakat di pemerintahan.

Table V.16. Apakah evaluasi masalah APBD sudah dilakukan dengan maksimal

No	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat sudah	sudah	Jarang	Kurang	Tidak pernah	
1	Tokoh Masyarakat	0	1	1	4	0	6
2	Tokoh Pemuda	0	1	1	4	0	6
3	Masyarakat Biasa	0	4	28	47	0	79
Jumlah		0	6	30	55	0	91
Persentase		0	7	33	60,43	0	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas terhadap evaluasi yang dilakukan oleh DPRD dalam masalah APBD, maka dapat dikategorikan kurang, karena dari 91 orang responden yang menyatakan kurang adalah 55 orang atau 60,43%, sedangkan yang menyatakan sangat sudah tidak ada.

Evaluasi merupakan proses memperbaiki kinerja yang telah dilakukan agar dapat dilihat dan diselesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada, semakin sering melakukan evaluasi maka semakin banyaklah kegiatan yang dianggap kurang dan masalah yang ada pun akan dapat diselesaikan. Jika masalah anggaran sering dilakukan evaluasi, maka anggaran yang telah digunakan akan nampak apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau tidak, apabila anggaran yang ada sudah sesuai dengan ketentuan maka kegiatan tersebut akan terus dilanjutkan dan sebaliknya seandainya anggaran yang digunakan banyak terjadi penyelewengan maka, akan dilakukan tindakan yang tegas baik itu peneguran maupun dengan menggunakan hukuman yang telah ditentukan

Table V.17. Apakah pengesahan APBD sudah didasarkan atas kepentingan masyarakat

No	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat sudah	Sudah	Cukup	Kurang	Tidak pernah	
1	Tokoh Masyarakat	0	0	1	4	1	6
2	Tokoh Pemuda	0	0	1	5	0	6
3	Masyarakat Biasa	0	2	41	36	0	79
Jumlah		0	2	17	45	27	91
Persentase		0	2	19	49	30	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas terhadap pengesahan APBD berdasarkan atas kepentingan masyarakat, maka dapat dikategorikan kurang, karena dari 91 orang responden yang menyatakan kurang adalah 45 orang atau 49%, sedangkan yang menyatakan sangat sudah tidak ada.

Permasalahan ini mungkin sudah menjadi rahasia umum, tentang posisi masyarakat dalam pemerintahan, masyarakat selalu dijadikan kambing hitam dalam setiap kegiatan, undang-undang negara atau peraturan daerah masyarakat selalu dijadikan pelang nama untuk mendapatkan perhatian, tetapi aplikasinya tidak sedemikian rupa, banyak permasalahan masyarakat yang tertumpuk dalam segala bidang, yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Natuna anggaran yang begitu besar hanya beberap persen saja yang dipasilitasi untuk rakyat, lebihnya entah kemana larinya. Masyarakat natuna tidak ubuhnya kehidupan mereka dengan masyarakat yang berada didaerah lain, kehidup yang sejahtera tidak pernah dirasakan, kebutuhan yang mereka perlukan baik yang berbentuk bersifat vasilitas maupun anggaran hampir jarang dipikirkan oleh pejabat-pejabat daerah Khususnya DPRD Kabupaten Natuna, orang yang merasakan berkecukupan hanyalah kaum-kaum pejabat saja dan orang-orang yang berhubungan dengan mereka.

Fungsi anggran yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Natuna, jika dilihat dari penilainnya responden yang berada di Kabupaten Natuna di dapi I berdasarkan dari beberpa pertanyaan yang diajukan oleh penulis khususnya pertanyaan yang berhubungan dengan Fungsi anggaran DPRD Kabuapten Natuna, maka dapat disimpulkan kinerja DPRD dalam bidang anggaran adalah "kurang baik." Pendapat responen diperkuat dengan data laporan di bawah ini:

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Natuna meliputi pengujian atas Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004-2009. Dan masalah-masalah material yang ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Realisasi pengeluaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp259.164.766.043,00, diantaranya terdapat penerbitan SPMU Belanja Rutin Non Pegawai sebesar Rp58.005.170.000,00 yang mendahului pengesahan APBD, sehingga pengeluaran tersebut belum mempunyai dasar pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Realisasi pengeluaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp96.123.145.800,00, diantaranya terdapat SPJ Proyek sebesar Rp16.848.015.721,00 yang belum diverifikasi Bagian Keuangan, sehingga penyajian laporan keuangan Tahun Anggaran 2004 belum akurat.

3. Realisasi pengeluaran Pos Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp18.584.366.500,00, diantaranya terdapat SPJ Pos Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain Sebesar Rp1.944.570.000,00 digunakan untuk bantuan organisasi Profesi, bantuan untuk organisasi vertikal dan organisasi sosial yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga pengeluaran tersebut tidak tepat sasaran dan memboroskan keuangan daerah.
4. Realisasi pengeluaran Pos Pengeluaran Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp11.499.444.750,00, diantaranya sebesar Rp2.689.315.000,00 digunakan untuk bantuan operasional Polisi Perairan dan Koramil, bantuan untuk pembinaan LSM Kepulauan Riau dan bantuan modal untuk Perusahaan Daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga pengeluaran tersebut tidak tepat sasaran dan berpotensi terjadi penyalahgunaan pengeluaran keuangan daerah.
5. Beberapa Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2005 Belum Selesai Ditindaklanjuti Terdapat Pengeluaran Belanja pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp1.791.094.000,00 dan Dinas Kimpraswil sebesar Rp8.116.220.686,00 Belum Disahkan namun Digunakan sebagai Bahan Perhitungan APBD
6. Realisasi belanja untuk keperluan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp540.000.000,00 tidak sesuai ketentuan. Pengeluaran dimaksud meliputi biaya pemeliharaan kesehatan sebesar Rp240.000.000,00 yang dibayarkan dalam bentuk tunai, bantuan biaya perumahan sebesar Rp200.000.000,00 yang belum didasarkan atas SKB dan pengadaan pakaian dinas sebesar Rp100.000.000,00 yang dibayarkan dalam bentuk tunai, sehingga pengeluaran tersebut tidak tepat sasaran.
7. Sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 Sebesar Rp2.521.961.065,00 Terlambat Disetorkan
8. APBD Kabupaten Natuna tahun 2007 sebesar 1,7 T yang sangat bombastis dari APBD sebelumnya.
9. Senin, 22 September 2008 Tercatat anggaran perubahan Natuna sebesar Rp1,04 T dan deficit, sebesar 22,05 persen atau senilai Rp217 M.
10. APBD Kabupaten Natuna tahun 2009 sebesar 800 M yang sangat berbeda dengan tahun sebelumnya

V..2.3. Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Natuna ,

Kata "pengawasan" sering disama artikan dengan kata "kontrol, supervisi, monitoring atau auditing." Dalam konteks pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, yang salah satu fungsinya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, apakah kebijakan publik itu telah dijalankan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kata yang tepat untuk mewakili istilah "pengawasan" adalah oversight, yang berarti pengamatan dan pengarahan terhadap sebuah tindakan berdasarkan kerangka yang ditentukan.

Dalam konteks DPRD sebagai lembaga politik, fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Hal inilah yang membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dengan lembaga lain seperti BPK, Bawasda, Inspektorat Daerah dan lainnya. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat politis, yang parameternya adalah PKPD yang ditetapkan tiap tahun berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan formalisasi penjabaran visi dan misi atau janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika mereka berkampanye.

DPRD sebagai sebuah lembaga/institusi dan bukan pada anggota DPRD secara perorangan. Artinya bila DPRD ingin menjalankan fungsi dan kewenangan di bidang pengawasan, mestinya dilakukan melalui alat kelengkapan DPRD yang ada, baik yang bersifat tetap seperti komisi-komisi dan panitia anggaran, maupun yang bersifat sementara seperti panitia khusus (pansus), itupun sepanjang tata cara pelaksanaan ketentuan diatur dalam Tata Tertib DPRD. Pengawasan yang tak mengacu pada peraturan perundang-undangan serta prosedur yang telah dibakukan oleh lembaga semisal Tata Tertib DPRD atau Keputusan DPRD lainnya, tidak akan memberi hasil yang efektif, dan tidak lebih hanya pendapat pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan. Oleh karena itu rule of law maupun rule of game dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan di bidang pengawasan serta standar akuntabilitas yang baku harus diutamakan untuk menghindarkan diri dari politisasi fungsi pengawasan. Tanpa memperhatikan aspek-aspek tersebut, pengawasan DPRD mustahil mampu memperbaiki kinerja pemerintah daerah, melainkan hanya sekedar sensasi dan akrobat politik yang tidak menutup kemungkinan tergelincir ke dalam pembunuhan karakter terhadap mitra yang menjadi obyek pengawasannya.

Berikut ini adalah tabel mengenai pengukuran tingkat pelaksanaan kinerja DPRD Kabupaten Natuna 2004-2009 dalam bidang pengawasan, dengan memberikan kuosioner yang diajukan kepada responden dengan pertanyaannya adalah:

Table V.18 Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah dengan baik

No	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat baik	Baik	Cukup baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Tokoh Masyarakat	0	0	1	2	3	6
2	Tokoh Pemuda	0	0	0	3	2	6
3	Masyarakat Biasa	0	6	38	36	1	79
Jumlah		0	6	39	40	6	91
Persentase		0	7	43	44	7	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas tentang pengawasan terhadap peraturan daerah (daerah), maka dapat dikategorikan kurang baik, karena dari 91 orang responden yang menyatakan kurang baik adalah 40 orang atau 44%, sedangkan yang menyatakan sangat baik tidak ada.

Peraturan daerah merupakan landasan dan acuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan di pemerintahan, jadi semua kegiatan tidak boleh keluar dari pada ketentuan yang telah diatur oleh peraturan daerah yang ada, oleh karena itu perda haruslah dibuat secepat mungkin.

Pengawasan terhadap peraturan daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Natuna berada pada tingkatan kurang baik, padahal ini merupakan salah satu fungsi dari DPRD. Jika fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD tidak berjalan dengan maksimal, maka akan banyak terjadi permasalahan-permasalahan. Tidak dapat dihindari memang sekarang ini lah yang terjadi di Natuna banyak permasalahan yang timbul akhir-akhir ini.

Table V.19. Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Bupati dengan baik

N o	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat baik	Baik	Cukup baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Tokoh Masyarakat	0	0	0	3	2	6
2	Tokoh Pemuda	0	0	0	3	3	6
3	Masyarakat Biasa	0	5	27	44	4	79
Jumlah		0	5	27	50	9	91
Persentase		0	5,49	30	55	10	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas tentang pengawasan terhadap Peraturan Bupati, maka dapat dikategorikan kurang baik, karena dari 91 orang responden yang menyatakan kurang baik adalah 50 orang atau 55%, sedangkan yang menyatakan sangat baik tidak ada.

Ini dikarenakan peraturan yang dibuat oleh bupati tidak berjalan dengan lancar, peraturan dibuat untuk ditaati bukan dilanggar dan bagaimana peraturan ini bisa dijadikan alat untuk melakukan penertibat dalam bertindak. Seharusnya apabila suatu hukum telah dibuat maka harus ditaati agar semua program-program yang telah dijalankan akan berjalan dengan lancar, apabila sebaliknya peraturan yang dibuat tidak dijalankan maka akan timbul kekacauan dan akan timbul asumsi dari banyak orang bahwa hukum dibuat hanya digunakan sebagai simbol saja dan dan bahan arsip yang akan disimpan.

Table V.20. Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap Keputusan Bupati daerah dengan baik

N o	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat baik	Baik	Cukup baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Tokoh Masyarakat	0	0	1	3	2	6

2	Tokoh Pemuda	0	0	1	3	2	6
3	Masyarakat Biasa	0	0	37	40	2	79
Jumlah		0	0	39	46	6	91
Persentase		0	0	43	50	7	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas tentang pengawasan terhadap Keputusan Bupati maka, dapat dikategorikan kurang baik, karena dari 91 orang responden yang menyatakan kurang baik adalah 46 orang atau 50%, sedangkan yang menyatakan sangat baik tidak ada.

Sering keputusan yang dilakukan oleh bupati secara sepihak dalam artikata, keputusan yang diberikan didasarkan nepotisme atau padang bulu, tidak berdasarkan atas perkembangan yang hendak dicapai, karena kinerja bupati seperti itu dan pengawasan dari DPRD tidak maksimal maka masyarakat selalu mendating bupati secara individu yang bukan pada tempatnya seperti dirumahnya dan ditempat-tempat tertentu dalam artikata diluar jam dinas bupati untuk mendapatkan persetujuan bupati terhadap permasalahan yang mereka hadapi, seperti dalam hal melamar kerja, pengeluaran surat keterangan (SK) pada bidang tertentu.

Table V.21. Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dengan baik

No	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat sudah	sudah	Cukup	Kurang	Tidak pernah	
1	Tokoh Masyarakat	0	0	0	3	3	6
2	Tokoh Pemuda	0	0	1	3	2	6
3	Masyarakat Biasa	0	2	25	42	10	79
Jumlah		0	2	26	48	15	91

Persentase	0	2	29	53	16	100
------------	---	---	----	----	----	-----

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas tentang pengawasan terhadap APBD, maka dapat dikategorikan kurang. Karena dari 91 orang responden yang menyatakan kurang adalah 48 orang atau 53%, sedangkan yang menyatakan sangat sudah tidak ada.

Jika dilihat lapangan memang itulah yang terjadi, anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya tidak tepat sasaran, jangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran yang ada malahan anggaran yang ada digunakan oleh mereka untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari, sehingga untuk pembangunan daerah hanya sekedar saja. Seharusnya dengan adanya mereka, maka natuna bisa bersaing dengan daerah lain. Harapan yang diinginkan oleh masyarakat jarang menjadi kenyataan,

Rata-rata pendidikan masyarakat natuna sangat rendah, kebanyakan dari mereka adalah tamatan SD, jadi ketika ada permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya berdiskusi sesama mereka, tidak pernah terpikirkan oleh mereka untuk melakukan tindakan yang akan menggulingkan roda pemerintahan yang berkuasa pada saat ini. Dengan kondisi seperti ini maka kaum-kaum pejabat lebih leluasa dalam melampirkan keinginan mereka, untuk menutupi perbuatan tersebut, mereka.

Dalam masalah anggaran sangat sering terjadi permasalahan baik sisip dalam menggunakan anggaran, mengelapkan anggaran pun sering terjadi terutapi di instansi pemerintah, oleh karena itu pengawasan yang ketat harus dijalankan dengan sebaik mungkin, untuk menghindari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

Table V.22. Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dengan baik.

<i>No</i>	<i>Jabatan Responden</i>	<i>Tanggapan Responden</i>					<i>Jumlah</i>
		<i>Sangat sudah</i>	<i>Sudah</i>	<i>Cukup</i>	<i>Kurang</i>	<i>Tidak pernah</i>	
<i>1</i>	<i>Tokoh Masyarakat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>6</i>
<i>2</i>	<i>Tokoh Pemuda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>6</i>
<i>3</i>	<i>Masyarakat Biasa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38</i>	<i>32</i>	<i>3</i>	<i>79</i>
<i>Jumlah</i>		<i>0</i>	<i>6</i>	<i>29</i>	<i>47</i>	<i>9</i>	<i>91</i>
<i>Persentase</i>		<i>0</i>	<i>7</i>	<i>32</i>	<i>54</i>	<i>10</i>	<i>100</i>

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas tentang pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah maka dapat dikategorikan kurang, karena dari 91 orang responden yang menyatakan kurang adalah 47 orang atau 54%, sedangkan yang menyatakan sangat sudah tidak ada.

Dalam mengawasi program pembangunan daerah selama ini boleh dikatakan sangat kurang, karena DPRD jarang turun kelapangan untuk melakukan survei, padahal program reses yang telah ditetapkan dalam tata tertib DPRD sudah mengajurkan agar setiap anggota DPRD turun kelapangan untuk melihat dan mengawasi pembangunan apa saja yang telah dibangun dan yang belum dibangun, karena kurangnya survei yang dilakukan oleh DPRD kelapangan, maka mereka kurang memperhatikan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh setiap daerah yang berada di Kabupaten Natuna. Hal ini terjadi dikarenakan mereka kurang merasa tanggungjawab terhadap perkembangan di daerah.

Pembangunan daerah sangat dibutuhkan oleh daerah karena dengan pembangunan yang ada akan memudahkan suatu daerah untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera, terutama pembangunan yang dibangun untuk mendukung kemajuan tersebut seperti fasilitas pendidikan,

pasilitas ekonomi, dan pasilititas dalam proses memudahkan kerja pemerintah untuk melayani masyarakat.

Table V.23. Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap kerja sama Internasional di daerahbdengan baik

No	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat sudah	Sudah	Cukup	Kurang	Tidak pernah	
1	Tokoh Masyarakat	0	0	1	2	3	6
2	Tokoh Pemuda	0	0	0	4	2	6
3	Masyarakat Biasa	0	7	29	41	1	79
Jumlah		0	7	30	47	7	91
Persentase		0	8	33	52	7,69	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas tentang pengawasan terhadap kerja sama Internasional maka dapat dikatagorikan kurang, karena dari 91 orang responden yang menyatakan kurang adalah 47 orang atau 52%, sedangkan yang meyatakan sangat sudah tidak ada.

Jika dilihat di lapangan, kerja sama Internasional hampir tidak ada, sekarang ini Natuna tidak begitu membuka diri terhadap luar negeri, sehingga banyak kekayaan yang dimiliki oleh Natuna tidak bisa dikelola dengan maksimal. Untuk menghapuskan rakyat natuna sendiri mengolah kekayaan yang ada, sangat sulit karena mereka pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.

Table V.24. Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap Pinjaman Daerah

No	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat baik	Baik	Cukup baik	Kurang baik	Tidak baik	
1	Tokoh Masyarakat	0	0	1	4	1	6
2	Tokoh Pemuda	0	1	1	4	1	6
3	Masyarakat	0	0	29	48	1	79

	Biasa						
Jumlah		0	1	31	56	3	91
Persentase		0	1,09	34,06	61,53	3,29	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas tentang pengawasan terhadap pinjaman daerah maka dapat dikategorikan kurang baik, karena dari 91 orang responden yang menyatakan kurang baik adalah 56 orang atau 61,53%, sedangkan yang menyatakan sangat baik tidak ada.

Pinjaman daerah digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada pada daerah dalam melaksanakan pembangunan dan bermacam-macam kegiatan lainnya, pengawasan terhadap pinjaman daerah yang dilakukan oleh DPRD tidak maksimal, karena pinjaman yang dilakukan untuk pembangunan daerah sering digunakan untuk kepentingan pribadi sedang pinjaman tersebut atas nama daerah.

Apabila pengawasan yang dilakukan DPRD sudah maksimal maka pinjaman yang telah dilakukan akan tepat sasaran dan hasilnya akan dapat dirasakan oleh semua kalangan.

Table V.25. Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap Pemungutan Pajak/Ristribusi

No	Jabatan Responden	Tanggapan Responden					Jumlah
		Sangat baik	sudah	Cukup	Kurang	Tidak pernah	
1	Tokoh Masyarakat	0	0	2	2	2	6
2	Tokoh Pemuda	0	0	3	2	1	6
3	Masyarakat Biasa	0	8	26	44	1	79
Jumlah		0	8	48	31	4	91
Persentase		0	9	53	34,06	4,39	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Dari tanggapan responden di atas tentang pengawasan terhadap pemungutan pajak/ristribusi maka dapat dikategorikan cukup, karena dari 91 orang responden yang

menyatakan cukup adalah 48 orang atau 53%, sedangkan yang menyatakan sangat baik tidak ada.

Dalam artian telah dilakukan tetapi belum maksimal. Pajak merupakan salah satu pendapatan pemerintah, yang apabila dikelola dengan baik. Pengawasan DPRD dalam masalah pajak/distribusi sudah agak nampak.

Pengawasan merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh pihak tertentu yang diberi kewenangan untuk itu, apabila pengawasan yang ketat dan sungguh-sungguh dilakukan maka, kecil kemungkinan rencana yang telah dilakukan akan mengalami kegagalan, karena apabila diawasi maka seseorang ataupun kelompok orang akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya dan pula apabila terjadinya penyimpangan maka akan segera diketahui dan secepat mungkin untuk diperbaiki.

Selama masa jabatan 5 tahun yang diberikannya oleh pemerintah kepada DPRD, seharusnya masa tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membangun daerah yang maju dari segala bidang kehidupan, tetapi masa yang diberikan tersebut hampir tidak membawakan hasil yang maksimal, memang ada perubahan dalam bidang tertentu tetapi kapasitasnya sangatlah minim sekali, itu pun perubahan yang ada merupakan kedok dari mereka agar tidak terlalu nampak keburukan yang mereka kerjakan., khususnya kinerja DPRD Kabupaten Natuna dalam bidang pengawasan yang kurang baik hal ini berdasarkan data yang ada yaitu,

- 1 Adanya perda, peraturan dan kebijakan bupati yang berjalan tidak baik,
- 2 Anggaran setiap tahunnya tidak sesuai dengan pembangunan yang ada, baik dari segi fisik maupun mental,
- 3 Terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh anggota DPRD,

- 4 Pakjak/ristribusi belum berjalan dengan lancar,
- 5 Kerjasama Internasional belum mampu diwujudkan.

Tabel V.26. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kinerja DPRD Kabupaten Natuna priode 2004-2009.

No	Indikator-Indikator	Tanggapan Responden					Jumlah
		SB	B	CB	KB	TB	
Fungsi Legislasi DPRD							
1	Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah membuat perda	13	40	27	9	2	91
2	Pengetahuan DPRD tentang perda	22	35	20	12	2	91
3	Pebuatan perda berdasarkan kepentingan masyarakat	25	38	15	15	1	91
4	Adakah perda yang dibuat sering dibatalakan oleh Mendagri	13	40	30	6	2	91
5	kapasitas perda yang dibuat setiap tahunnya	20	42	22	6	1	91
Fungsi Anggaran DPRD							
6	Transparan dalam pengelolaan APBD	2	4	20	61	4	91
7	Penyusunan APBD berdasarkan sekala proritas atau tidak	2	5	27	50	7	91
8	Panitia anggaran sedah bekerja dengan maksimal	0	12	24	52	3	91
9	Pengelolaan APBD sudah sesuai dengan atauran	0	9	28	51	3	91
10	Apakah RAPBD sudah sesuai dengan RKPD	0	2	33	56	3	91
11	Pertanggungjawaban dalam masalah APBD	0	11	40	33	7	91
12	APBD yang defisit setiap tahunnya	0	9	36	39	7	91
13	Evaluasi masalah APBD	0	6	30	55	0	91
14	Pengesahan APBD berdasarkan kepentingan masyarakat	0	2	43	45	1	91
Fungsi Pengawasan DPRD							
15	Pengawasan terhadap Perda	0	6	49	40	6	91
16	Pengawasan terhadap Peraturan Bupati	0	5	27	50	9	91
17	Pengawasan terhadap Keputusan Bupati	0	0	39	46	6	91
18	Pengawasan terhadap pengelolaan APBD	0	2	26	48	15	91
19	Pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah	0	7	32	54	10	91
20	Pengawasan terhadap kerjasama Internasional	0	7	30	47	7	91
21	pengawasan terhadap pinjaman daerah	0	1	31	58	3	91
22	pengawasan terhadap pemungutan pajak/Ristribusi	0	8	48	31	4	91
Jumlah		115	291	660	854	102	2002
Rata-rata		5	13	30	38	5	91
Persentase		6	14	33	42	5	100

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2009

Keterangan : SB: Sangat Baik
CB: Cukup Baik

B : Baik
KB: Kurang Baik

TD: Tidak Baik

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden di atas terhadap kinerja DPRD Kabupaten Natuna periode 2004-2009 maka, dapat dikategorikan, “kurang baik”, karena jumlah responden yang menyatakan kurang baik adalah 42%, sedangkan yang menyatakan sangat baik hanya 6%.

DPRD Kabupaten Natuna mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu: fungsi pembuatan kebijakan (legislasi), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dari tiga fungsi DPRD Kabupaten Natuna yang dapat mereka jalankan adalah fungsi legislasi, dikarenakan masyarakat merasa puas terhadap perda yang telah dibentuk, dalam masa jabatannya DPRD telah membuat 82 buah perda yang ada di Kabupaten Natuna dan diantara perda yang ada tersebut berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Natuna.

Fungsi anggaran dan pengawasan dikategorikan belum mampu dijalankan karena, laporan setiap tahunnya kurang jelas dan banyak terjadi penyimpangan, anggaran setiap tahunnya tidak sesuai dengan pembangunan yang ada, baik dari segi fisik maupun mental, terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh anggota DPRD, adanya perda, peraturan bupati dan kebijakan bupati yang tidak berjalan dengan baik dan kerja Internasional belum mampu diwujudkan.

V.3. Faktor Penghambat Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2004-2009 Kabupaten Natuna Kurang Baik

Kabupaten Natuna merupakan daerah yang sangat strategis untuk melakukan perubahan dalam segala bidang, karena posisinya yang dikelilingi oleh negara-negara asing. Ditambah lagi dengan anggaran yang dimiliki setiap tahunnya yang begitu besar serta kekayaan alam yang sangat potensi. Natuna jika dikendalikan oleh orang-orang yang bertanggungjawab maka untuk melakukan perubahan dalam segala bidang bukanlah yang sulit. Sampai sekarang di Natuna tidak ada perubahan yang sangat menonjol dari segala bidang. Hal ini terjadi dikarenakan kinerja

DPRD Kabupaten Natuna periode 2004-2009 kurang maksimal. Kurangnya kinerja DPRD Kabupaten Natuna dikarenakan beberapa faktor.

Adapun faktor-faktor penghambat kinerja DPRD Kabupaten Natuna periode 2004-2009 adalah:

1. Tingkat Pendidikan Tidak Memadai

Pendidikan merupakan suatu proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, pendidikan yang tinggi akan mendatangkan pengetahuan yang luas, dengan pengetahuan yang luas maka akan lebih maksimal dalam menjalankan semua kegiatan. Pada dasarnya pendidikan harus didapatkan oleh semua kalangan masyarakat agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar.

Jika dilihat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Natuna, sangatlah minim, rata-rata diantara mereka tamatan SMA, kemudian ada beberapa orang diantara mereka tamatan Diploma dan sarjana. Dengan kapasitas pendidikan yang mereka miliki maka mereka tidak akan maksimal dalam menjalankan tugas mereka. Anggota DPRD dipilih bukan berdasarkan atas kemampuan mereka, tetapi berdasarkan atas hutang budi yang mereka tebarkan kepada masyarakat berupa uang beberapa rupiah dan sembako. Berdasarkan data yang didapatkan di kantor DPRD Kabupaten Natuna menyatakan bahwa tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Natuna masih kurang memadai, data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 27 . Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009 Berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SMU Sederajat	14	70 %
2.	Diploma	1	5 %
3.	S1	5	25 %
Jumlah		20	100 %

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan DPRD Kabupaten Natuna Tahun 2009

2. Kurangnya Rasa Tanggungjawab

DPRD Kabupaten Natuna yang pada dasarnya merupakan tempat keluhan dari berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat, tapi kenyataannya tidak begitu, mereka yang mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat, malah sebaliknya mereka yang minta dilayani. Ini menunjukkan hal yang tidak pantas dilakukan oleh abdi negara. Jika rasa tanggungjawab dimiliki oleh DPRD maka, kemungkinan apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat diaplikasikan dan bahkan mereka tidak sempat untuk memikirkan tentang kebutuhan pribadi mereka karena begitu banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,

- a. Masyarakat meminta pengelolaan hasil laut yang maksimal agar perekonomian masyarakat lebih mapan.
- b. Masyarakat meminta sarana transportasi segera di dibangun
- c. Perbaiki rumah warga yang sudah tidak layak dipakai

Masih banyak lagi keinginan masyarakat yang lainnya yang tidak diaplikasikan. seharusnya seorang pemimpin mampu menunjukkan ketauladanan mereka kepada yang dipimpin sehingga, karena kepemimpinan mereka selain akan dipertanggungjawabkan di dunia bahkan diakhirat nanti seperti hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya:

”sesungguhnya kalian semua adalah. Kalian semua akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Dan Raja adalah pemimpin rakyatnya akan ditanya tentang rakyatnya. Dan laki-laki adalah pemimpin bagi rumah tangga, akan ditanya tentang rumah tangganya, istri adalah pemimpin bagi rumah tangga kaum-kaumnya dan anak-anak dan akan ditanya tentang itu dan hamba sahaya bertanggungjawab tentang harta majikannya, akan ditanya tentang tanggungjawab itu. Singkatnya kalian semua adalah pemimpin yang akan ditanya atas apa yang menjadi tanggung jawabnya” (Hr. Bukhari, Muslim).

3. Kurangnya melihat kondisi dan keadaan masyarakat

DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan seharusnya ia mengetahui apa yang diinginkan masyarakat dan berusaha untuk mewujudkan demi kesejahteraan masyarakat, tetapi pada kenyataannya hal itu tidak dapat diwutkan oleh DPRD Kabupaten Natuna Khususnya, ini

dikarena DPRD jarang turun kelapangan untuk melakukan survei, padahal program reses yang telah ditetapkan dalam tata tertib DPRD sudah mengajurkan agar setiap anggota DPRD turun kelapangan untuk melihat dan mengawasi pembangunan apa saja yang telah dibangun dan yang belum dibangun, karena kurangnya survei yang dilakukan oleh DPRD kelapangan, maka mereka kurang memperhatikan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh setiap daerah yang berada di Kabupaten Natuna. Kegiatan riset DPRD Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.28. Tahapan dan Rentang Waktu Reses Anggota DPRD

No	Tahapan	Rentang Waktu
1.	Tahap I	Akhir April-Awal Mei
2.	Tahap II	Akhir Agustus-Awal September
3.	Tahap III	Akhir Desember-Awal Januari

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna 2009.

Dengan adanya program riset tersebut harapannya adalah agar anggota DPRD bisa berjumpa dan berdiskusi dengan tokoh maupun dengan masyarakat biasa dan menanyakan keluhan yang ada pada masyarakat setempat dan mengusahakan semua keluhan dari masyarakat akan dibahas di DPRD dan berusaha merealisasikannya.

4. Kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat

Peran pemerintah pusat sangat penting dalam rangka mewujudkan perkembangan di daerah, memang setelah adanya otonomi daerah, pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur segala kegiatan yang dianggap perlu di daerah tersebut berdasarkan potensi yang ada. Peran pemerintah disini bukanlah mengatur segala kegiatan-kegiatan yang ada di daerah, tetapi pemerintah pusat harus mengawasi jalannya kegiatan yang berada di daerah dan melihat perkembangan yang sudah ada, jika terjadi permasalahan, maka pusat berhak untuk menghentikan kegiatan tersebut dan bahkan membatalkannya, seperti masalah anggaran, yang ada

didaerah tersebut. Dari data yang diperoleh hanya beberapa kali saja datang ke Natuna untuk mengawasi kinerja pemerintah Kabupaten Natuna.

5. Kurangnya pengawasn masyarakat terhadap kinerja DPRD

Kurangnya tekanan publik dari pers, aktivis kampus, ormas dan LSM selingkungan Kabupaten Natuna kepada para Anggota DPRD Kabupaten Natuna (parlemen serta parpol) agar mereka menjadi lebih aspiratif dan responsif pada konstituennya.

Berbagai kritik yang muncul lebih bersifat sporadis, individual dan tidak berkesinambungan. Misalnya, universitas tidak mengintegrasikan masalah pemantauan dan evaluasi kinerja DPRD. Lantas pers tidak merencanakan dan mengalokasikan waktu dan tempat yang cukup dan terencana untuk mengawasi tugas dan kinerja DPRD, serta Ormas dan LSM yang tidak mampu menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan Ormas dan LSM masih ketergantungan kepada pemerintah dalam hal dana operasional dan pembinaan organisasi.

6. Media masa berpihak kepada pemerintah

Media masa dizama sekarang sangat dibutuhkan, untuk mendapat berbagai macam informasi yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Media masa dapat digunakan untuk mendatangkan kebaikan dan juga keburukan. Berbagi jenis media masa yang ada pada saat sekarang ini diantaranya TV, Koran, intrnet dan berbagi jenis yang lainnya. Di daerah-daerah berkembang media masa digunakan untuk mengkritisi kerja dari pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketika pemerintah melakukan hal yang keliru maka media masalah yang mengesposkanya ke halayak ramai, sehingga dengan demikian pemerintah akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakan tertentu.

Media masa yang ada di Natuna sangat terbatas jumlahnya, dengan keterbatasan tersebut maka kinerja pemerintahan tidak begitu diketahui oleh semua kalangan masyarakat, ditambah

lagi media masa yang ada tersebut dibawah kendali pemeinta daerah, jadi ketia media masa mengesposkan kinerja mereka yang kurang baik maka akan ditekan dan bahkan dilarang untuk memproduksi lagi.

BAB VI

PENUTUP

VI. 1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap kinerja DPRD Kabupaten Natuna periode 2004-2009 dapat disimpulkan bahwa, kinerja DPRD Kabupaten Natuna selama 5 tahun masa jabatannya “kurang baik” karena:

1. Laporan setiap tahunnya kurang jelas dan banyak terjadi penyimpangan
2. Anggaran setiap tahunnya tidak sesuai dengan pembangunan yang ada, baik dari segi fisik maupun mental.
3. Terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh anggota DPRD,
4. Adanya perda, peraturan bupati dan kebijakan bupati yang tidak berjalan dengan baik.
5. Kerjasama Internasional belum mampu diwujudkan.

Namun dalam menjalankan Fungsi Legislasi dapat dikategorikan baik karena:

1. Masyarakat merasa puas dengan peraturan daerah yang telah dibentuk.
2. Perda yang telah dibentuk selama 5 tahun berjumlah 82 buah.
3. Dari perda yang terbentuk ada timbulnya dari inisiatif DPRD seperti di bidang perikanan

Adapun faktor-faktor penghambat kinerja DPRD Kabupaten Natuna periode 2004-2009 adalah:

1. Tingkat Pendidikan Tidak Memadai

Pendidikan anggota DPRD Kabupaten Natuna, sangatlah minim, rata-rata tamatan SMA yakni 14 orang atau 70%, yang tamatan sarjana (S1) yakni 5 orang atau 25%, sedangkan yang tamatan Diploma hanya 1 orang atau 5%. Dengan kapasitas pendidikan yang mereka miliki maka mereka tidak akan maksimal dalam menjalankan tugas mereka, ditambah lagi pendidikan yang

mereka dapatkan tidak berkenaan langsung dengan aktivitas mereka di DPRD. Anggota DPRD dipilih bukan berdasarkan atas kemampaun mereka, tetapi berdasarkan atas hutang budi yang merek tebarkan kepada masyarakat berupa uang beberapa rupiah dan sembako.

2. Kurangnya Rasa Tanggungjawab

DPRD Kabupaten Natuna yang pada dasarnya merupakan tempat menyalurkan berbagi permasalahan yang dialami masyarakat, melayani kepentingan masyarakat. Ini menunjukkan hal yang tidak pantas dilakun oleh pejabat Negara. Jika rasa tanggungjawab dimiliki oleh DPRD maka, kemungkinan apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat diaplikasikan dan bahkan mereka tidak sempat untuk memikirkan tentang kebutuhan pribadi mereka karena begitu banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ada beberapa keluhan dari masyarakat yang tidak dapat dirialisasikan dauantaranya:

- a. Masyarakat meminta pengelolaan hasil laut yang maksimal agar perekonomian masyarakat lebih mapan.
- b. Masyarakat meminta sarana transportasi segera di dibangun
- c. Perbaikan rumah warga yang sudah tidak layak dipakai

3. Kurang melihat kondisi dan keadaan masyarakat

DPRD selaku wakil rakyat pembuat kebijakan seharusnya mengetahui apa yang diinginkan masyarakat dan berusaha untuk mewujudkannya demi kesejahteraan masyarakat, tetapi kenyataanya hal itu tidak dapat diwujudkan oleh DPRD Kabupaten Natuna, karena DPRD jarang turun ke lapangan untuk melakukan surve, padahal program reses yang telah ditetapkan dalam tata tertib DPRD sangat mengharuskan agar setiap anggota DPRD turun ke daerah pemilihan untuk melihat dan mengawasi pembangunan apa saja yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan, program reset tersebut dilakuan 3 kali dalam setau dengan daerah yang

berbeda-beda, karena program riset tersebut tidak dujalankan makabanyak keluhan masyarakat yang tidak tersampaikan

4. Kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat

Peran pemerintah pusat sang penting dalam rangka mewudjutkan perkembang di daerah, peran pemerintah di sini bukanlah mengatur segala kegiatan-kegiatan yang ada di daerah, tetapi pemerintah pusat harus mengawasi jalannya kegiatan yang berada di daerah dan melihat perkembangan yang sudah ada, jika terjadi permasalahan, maka pusat berhak untuk menghentikan kegiatan tersebut dan bahkan membatalkanya, seperti masalah anggran yang ada didaerah tersebut.

5. Kurangnya pengawasn masyarakat terhadap kinerja DPRD

Kurangnya tekanan publik dari pers, aktivis kampus, ormas dan LSM selingkungan Kabupaten Natuna kepada para Anggota DPRD Kabupaten Natuna (parlemen serta parpol) agar mereka menjadi lebih aspiratif dan responsif pada konstituennya.

1 Media masa berpihak kepada pemerintah

Media masa yang ada di Natuna sangat terbatas jumlahnya, dengan keterbatasan tersebut maka kinerja pemerintahan tidak begitu diketahui oleh semua kalangan masyarakat, ditambah lagi media masa yang ada tersebut di bawah kendali pemeintah daerah.

V.2. Saran

Melihat berbagai fenomena yang terjadi maka penulis menyarankan kepada:

1. Kepada DPRD Kabupaten Natuna agar menyadari tugas dan fungsinya di pemerintahan untuk rakyat, jangan lupa akan janji-janji yang telah diucapkan ketika berkompaye. Timbulkanlah rasa tanggungjawab terhadap pembangunan yang di Natuna, jangan

membodoh-bodohi masyarakat dengan cara apabun, karena mereka adalah bagian dari anda-anda, tunjukkanlah ketoladan yang pantas untuk ditiru dan dibanggakan

2. Pemerintah pusat harus senantiasa memantau dan mengawasi perkembangan di Kabupaten Natuna, agar lebih terarah dan tepat sasaran dalam menjalankan kegiatan-kegiatan demi natuna di masa yang akan datang
3. Kepada berbagai elemen masyarakat harus berani dalam menegakkan kebenaran, sampaikan yang salah itu salah dan sampaikan yang benar itu benar serta saling tolong-menolonglah dalam menegakkan kebenaran demi terwujudnya natuna yang sejahtera
4. Dan bagi kalangan media masa, tulis dan sampaikan kinerja yang dilakukan pemerintah yang sejujurnya apakah baik maupun buruknya
5. Bagi akademis dan yang berhubungan dengannya harus senantiasa melakukan perubahan dari segi mutu pendidikannya maupun pelayanannya, dan yang akan menggunakan skripsi ini dalam membuat skripsi berikutnya harus membuat permasalahan baru yang ada di DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT RajaGrafindo Persa : 2005.
- Al-Qur'an dan al- Hadist Rasulullah. SAW
- Ali, Faried, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislasi Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Enny, Wismar, *Analisis Peranan Badan Legislatif Daerah Dalam Pembentukan Perda (Studi Di DPRD Kota Yogyakarta) (tesis,2004)*.
- Huda, Nikmatul, *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakata: Pustaka Pelajar Offset, 2005.
- Jimung, Martin, *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta: 2005.
- Juliantara, Dadang, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, Bantul Yogyakarta: 2005.
- Kartiwa, *Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "good governance, (makalah)*, 2009.
- Kuncoro, Mudraja, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, *Menejemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Rasyid, Ryaas, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ricky, Griffin, *Manajemen*, Erlangga, Jakarta: 2004.
- Rivai, Vithazal, *Kiat Memimpin*, Jakarta: PT Grafindo Persaja, 2004.

Rizal, Pelaksanaan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Anggota DPRD, UNRI: 2008.

Soehino, *Ilmu Negara*, Yaogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2004

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2000.

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV ALFABETA, 2007.

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Wibisono, Dermawan, *Menejemen Kinerja*, Bandung: PT Gelora Aksara Peratama, 2006.

Wijaya, Haw , *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Natuna.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pembagian Wilayah Asal Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009.....	12
Tabel 1.2.	Tahapan dan Rentang Waktu Reses Anggota DPRD.....	16
Tabel II. 1.	Tehnik Pengukuran.....	39
Tabel III.1.	Jumlah Informan Dalam Penelitian.....	44
Tabel IV.1.	Data Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna dilihat dari Jenis Kelamin.....	49
Tabel IV.2.	Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Natuna.....	63
Tabel IV.3.	Komposisi Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2004-2009.....	65
Tabel IV.4.	Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2004-2009.....	68
Tabel IV.5.	Komposisi Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Natuna.....	69
Tabel IV.6.	Komposisi Fraksi-Fraksi Dalam Kelembagaan DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009.....	70
Tabel IV.7.	Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009 Berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikan.....	71
Tabel IV.8.	Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009 Berdasarkan Tingkat Usia.....	72
Tabel IV.9.	Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	72
Tabel V.1.	Jumlah Responden Penelitian masyarakat yang mengisi quisioner berdasarkan tingkat pendidikan.....	74
Tabel V.2.	Jumlah Responden Penelitian masyarakat yang mengisi quisioner berdasarkan tingkat umur.....	75
Tabel V.3.	Jumlah Responden yang mengisi quisioner berdasarkan pekerjaan.....	76
Tabel V.4.	Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah membuat peraturan daerah dengan baik.....	82
Table V.5.	Sejauh mana pengetahuan DPRD Kabupaten Natuna tentang peraturan daerah.....	83

Tabel V.6.	Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah membuat peraturan daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat.....	84
Table V.7.	Apakah peraturan daerah yang dibuat setiap tahunnya sering dibatalkan oleh Mendagri.....	86
Table V.8.	Apakah jumlah peraturan daerah yang ada sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan setiap tahunnya.....	86
Table V.9.	Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah trnsparan dalam masalah APBD.....	89
Table V.10.	Bagimana menurut Bapak/Ibu apakah penyusunan APBD sudah dilakukan dengan skala proritas.....	90
Table V.11.	Apakah panitia anggaran yang dibentuk DPRD sudah bekerja dengan makasimal.....	91
Table V.12.	Apakah APBD yang ada telah digunakan sesuai aturan.....	93
Table V.13.	Apakah rancangan APBD yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Natuna sesuai dengan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).....	94
Table V.14.	Apakah DPRD telah melakukan pertanggungjawaban masalah APBD dengan maksimal.....	95
Table V.15.	Apakah penyusunan APBD sering mengalami defisit setisp tahunnya.....	96
Table V.16.	Apakah evaluasi masalah APBD sudah dilakukan dengan maksimal.....	97
Table V.17.	Apakah pengesahan APBD sudah didasarkan atas kepentingan masyarakat.....	98
Table V.18.	Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah dengan baik.....	101
Table V.19.	Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Bupati dengan baik.....	102
Table V.20.	Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap Keputusan Bupati daerah dengan baik.....	103

Table V.21.	Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dengan baik.....	104
Table V.22.	Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dengan baik.....	106
Table V.23.	Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap kerja sama Internasional di daerah dengan baik.....	107
Table V.24.	Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap Pinjaman Daerah.....	108
Table V.25.	Apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap Pemungutan Pajak /Ristribus.....	109
Tabel V.26.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kinerja DPRD Kabupaten Natuna priode 2004-2009.....	111
Tabel V. 27.	Anggota DPRD Kabupaten Natuna Periode 2004-2009 Berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikan.....	113

QUISIONER PENELITIAN

ANALISA KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PRIODE 2004-2009 DI KABUPATEN NATUNA

Kepada Yang Terhormat
Bapak/Ibu
Di- Natuna

Semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari

Dalam menunjang pelaksanaan penelitian maka saya mengajukan permohonan bantuan kerja sama untuk dapat kiranya Bapak/Ibu mengisi sejumlah pertanyaan dan memberi sejumlah penjelasan atas pertanyaan yang dimaksud untuk tujuan sebagai analisa dalam penulisan laporan penelitian (Skripsi).

Adapun permasalahan yang hendak dipaparkan pada laporan penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah : Analisa Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Priode 2004-2009 Di Kabupaten Natuna”. Dan selanjutnya skripsi ini dikosumsi oleh kalangan Akademis dan tidak diedarkan pada masyarakat banyak. Untuk itu saya berharap dan bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu sekalian. Atas bantuna dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih

I. Petunjuk Pengisian

1. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul, Analisa Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Priode 2004-2009 Di Kabupaten Natuna, dan tidak berpengaruh terhadap kerja, karier Bapak/Ibu, Saudara/i atau yang lain sebagainya.
2. Mohon kesediaan Bapak/Ibu, Saudara/i untuk membaca setiap pertanyaan dengan teliti serta menjawab pertanyaan dengan benar, jujur dan jelas
3. Berikanlah tanda silang pada salah satu jawaban dari setiap pertanyaan a, b, c, d dan e

II. Identitas Koresponden

Nama	:	
Pangkat/ Jabatan	:	
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Pendidikan terakhir	:	

DAFTAR PERTANYAAN

III Fungsi Legislasi DPRD

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah membeut peraturan daerah dengan baik
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
2. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana pengetahuan DPRD Kabupaten Natuna tentang peraturan daerah
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah membeut peraturan daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Tidak sesuai
4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah ada peraturan daerah yang dibatalkan oleh Mendagri
 - a. Sangat ada
 - b. ada
 - c. Cukup ada
 - d. Kurang ada
 - e. Tidak ada
5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu berapa banyak peraturan daerah yang telah dibuat oleh DPRD Kabupaten Natun setiap tahunnya
 - a. Sangat banyak
 - b. Bayak
 - c. Cukup banyak
 - d. Kurang
 - e. Tidak ada

VI Fungsi Anggaran DPRD

6. Menurut Bapak/Ibu apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah trnsparan dalam masalah APBD
 - a. Sangat sudah
 - b. Sudah
 - c. Cukup sudah
 - d. Kurang
 - e. Tidak sama sekali
7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah penyusunan APBD sudah dilakukan dengan sekala proritas
 - a. Sangat sudah
 - b. Sudah
 - c. Cukup sudah
 - d. Kurang
 - e. Tidak sama sekali
8. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah lembaga anggaran yang dibentuk DPRD sudah bekerja dengan makasimal
 - a. Sangat sudah
 - b. Sudah
 - c. Cukup sudah
 - d. kurang
 - e. Tidak sama sekali

9. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah APBD yang ada sering masuk ke kantong pribadi anggota DPRD
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Cukup sering
 - d. Tidak
 - e. Tidak pernah
10. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah rancangan APBD yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Natuna sesuai dengan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang
 - e. Tidak sesuai
11. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah DPRD telah melakukan pertanggungjawaban masalah APBD dengan maksimal
 - a. Sangat sudah
 - b. Sudah
 - c. Jarang
 - d. Kurang
 - e. Tidak sama sekali
12. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah penyusunan APBD sering mengalami defisit setiap tahunnya
 - a. Sangat sering
 - b. Sering
 - c. Cukup sering
 - d. Tidak
 - e. Tidak pernah sama sekali
13. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah evaluasi masalah APBD sudah dilakukan dengan maksimal
 - a. Sangat sudah
 - b. Sudah
 - c. Kurang
 - d. Tidak
 - e. Tidak sama sekali
14. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah pengesahan APBD sudah didasarkan atas kepentingan masyarakat
 - a. Sangat sudah
 - b. Sudah
 - c. Kurang
 - d. Tidak
 - e. Tidak sama sekali

V Fungsi Pengawasan DPRD

15. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah dengan baik
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
16. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Bupati daerah dengan baik
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik

17. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap Keputusan Bupati daerah dengan baik
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
18. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dengan baik
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
19. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dengan baik
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
20. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap kerja sama Internasional di daerah dengan baik
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
21. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap Pinjaman Daerah
- a. Sangat sudah
 - b. Sudah
 - c. Cukup sudah
 - d. Kurang
 - e. Tidak pernah
22. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah DPRD Kabupaten Natuna sudah melakukan pengawasan terhadap Pemungutan Pajak /Ristribusi
- a. Sangat sudah
 - b. Sudah
 - c. Cukup sudah
 - d. Kurang
 - e. Tidak pernah